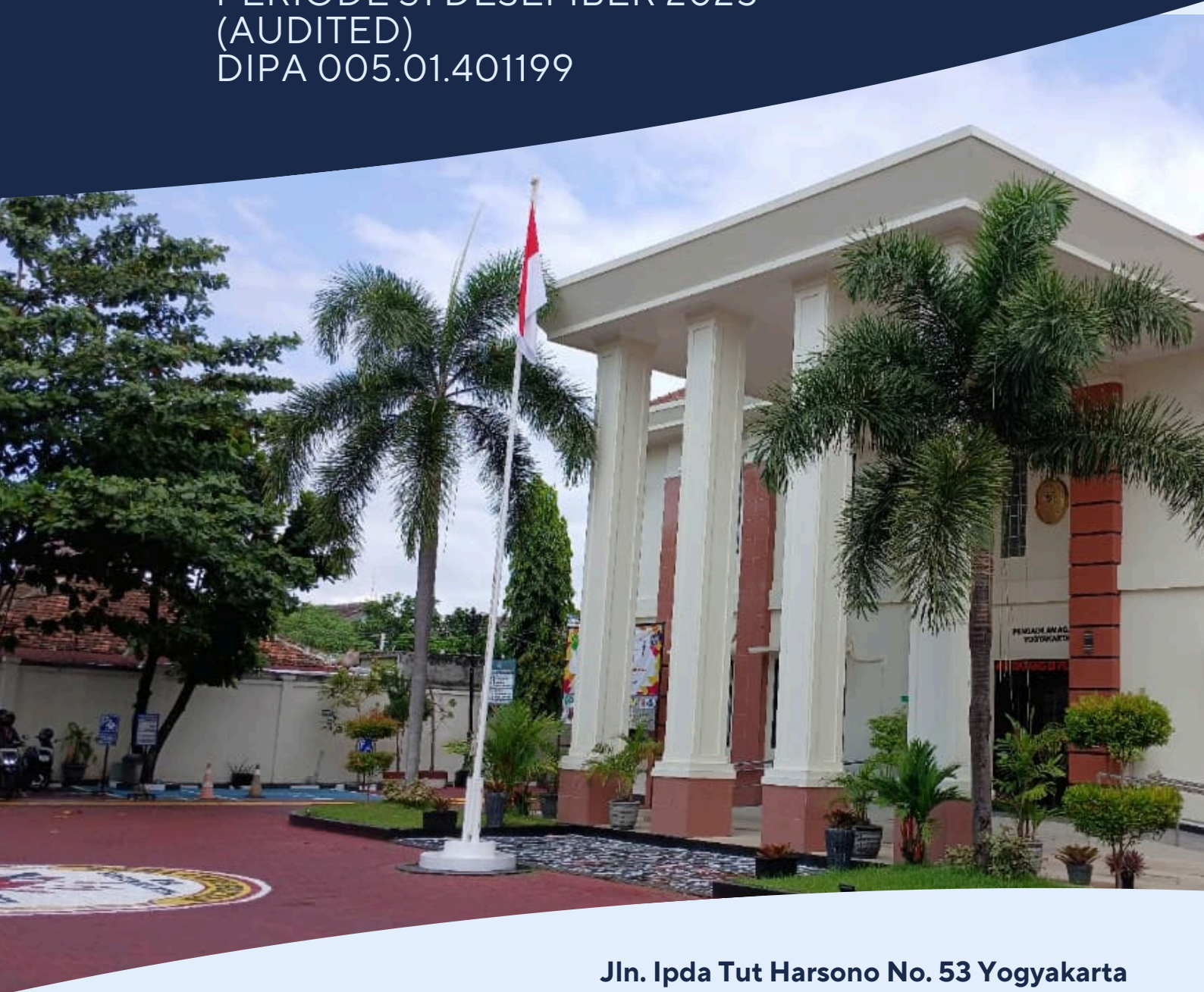




**PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA**

LAPORAN KEUANGAN

PERIODE 31 DESEMBER 2025
(AUDITED)
DIPA 005.01.401199



Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta
Telp. 0274-552997
email : admin@pa-yogyakarta.net

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025
DIPA 005.01.401199

Jln. Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta
DI. Yogyakarta - DI Yogyakarta
Telp. 0274-552997
e-mail : admin@pa-yogyakarta.net

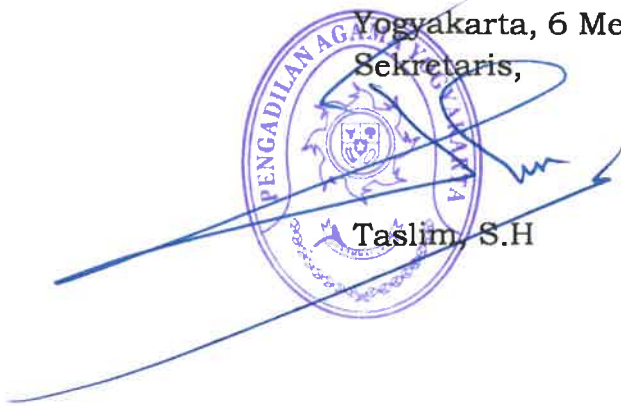
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu entitas di bawah Mahkamah Agung yang juga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 6 Mei 2026
Sekretaris,

Taslim S.H.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	60

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 6 Mei 2026

Sekretaris,

Taslim, S.H.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahunan Audited Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.3.931.432,- atau mencapai 132,37 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 2.970.000,- . Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.10.380.116.680,- atau mencapai 98,94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.10.491.074.000,-

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.48.403.098.497,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.13.851.550,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.48.389.246.947,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.1.247.547.705,- dan Rp.47.155.550.792,-

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.293.352,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.11.771.282.943,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(11.768.989.591,-). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp.8.201.120,-) dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(11.777.190.711,-).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.48.472.985.255,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(11.777.190.711,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.10.459.756.248,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.47.155.550.792,-.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Audited Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Cat	Th 2025				Th 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.970.000	3.931.432	961.432	132,37	2.969.808
Jumlah Pendapatan dan Hibah		2.970.000	3.931.432	961.432	132,37	2.969.808
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.2	9.118.494.000	9.007.701.054	(110.792.946)	98,78	8.801.377.836
Belanja Barang	B.2	1.172.080.000	1.171.927.086	(152.914)	99,99	1.360.829.286
Belanja Modal	B.2	200.500.000	200.488.540	(11.460)	99,99	-
Jumlah Belanja		10.491.074.000	10.380.116.680	(110.957.320)	98,94	10.162.207.122

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	13.851.550	12.522.900
Jumlah Aset Lancar		13.851.550	12.522.900
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	43.029.069.000	43.029.069.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.888.621.538	3.668.761.998
Gedung dan Bangunan	C.2.3	6.372.977.000	6.310.477.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	26.168.479	26.168.479
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(4.927.589.070)	(4.577.694.464)
Jumlah Aset Tetap		48.389.246.947	48.456.782.013
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan TP/TGR	C.3.1	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Dana yang dibatasi Penggunaannya	C.4.1	-	16.000.000
Aset Lain-Lain	C.4.2	-	103.475.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	-	(93.636.300)
Jumlah Aset Lainnya		-	25.839.200
JUMLAH ASET		48.403.098.497	48.495.144.113
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	1.247.547.705	22.158.858
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.247.547.705	22.158.858
JUMLAH KEWAJIBAN		1.247.547.705	22.158.858
EKUITAS	C.6		
Ekuitas	C.6.1	47.155.550.792	48.472.985.255
JUMLAH EKUITAS		47.155.550.792	48.472.985.255
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		48.403.098.497	48.495.144.113

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.293.352	2.969.808
JUMLAH PENDAPATAN		2.293.352	2.969.808
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	10.235.128.222	8.807.091.567
Beban Persediaan	D.3	18.236.400	16.973.700
Beban Barang dan Jasa	D.4	744.297.830	851.369.695
Beban Pemeliharaan	D.5	417.894.805	462.186.683
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.831.080	22.002.100
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	349.894.606	342.978.279
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		11.771.282.943	10.502.602.024
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(11.768.989.591)	(10.499.632.216)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset		(8.201.200)	-
Pendapatan Pelepasan Aset		1.638.000	-
Beban Pelepasan Aset		9.839.200	-
Surplus/ Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		80	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		80	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		80	-
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(8.201.120)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(11.777.190.711)	(10.499.632.216)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(11.777.190.711)	(10.499.632.216)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	48.472.985.255	48.776.150.157
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(11.777.190.711)	(10.499.632.216)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.459.756.248	10.196.467.314
EKUITAS AKHIR	E.5	47.155.550.792	48.472.985.255

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Yogyakarta

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Agama Yogyakarta didirikan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berada di bawah Mahkamah Agung RI. Entitas berkedudukan di Jl. Ipda Tut Harsono No. 53, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Yogyakarta berkomitmen dengan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
4. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata rapi dan lengkap

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang berhubungan dengan tupoksi Peradilan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya :

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
- Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan
atas Pos
Laporan
Realisasi
Anggaran*

Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.10.491.074.000,-. Selama Tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta yang disebabkan oleh adanya penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi.

Adapun perubahan tersebut :

1. Revisi Ke-01 pada tanggal 10 Januari 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK yaitu pergeseran akun untuk pembayaran tunjangan Hakim dari akun 511124 Tunjangan Fungsional PNS menjadi 511339 Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara dan pergeseran akun untuk pembayaran PPh 21 dari akun 511125 Tunjangan PPh PNS menjadi 511324 PPh Pejabat Negara.

2. Revisi Ke-02 pada tanggal 23 Februari 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan pemblokiran akun 532111, 533121, 521111, 521114, 521115, 521252, 521811, 522141, 523111, 523119, 523121, 521211 dikarenakan adanya efisiensi anggaran secara nasional.
3. Revisi Ke-03 pada tanggal 28 Februari 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
4. Revisi Ke-04 pada tanggal 23 Maret 2025 dikarenakan adanya pembukaan blokir efisiensi anggaran akun 532111, 533121, 521111, 521114, 521115, 521252, 521811, 522141, 523111, 523119, 523121, 521211.
5. Revisi Ke-05 pada tanggal 21 April 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
6. Revisi Ke-06 pada tanggal 26 Juni 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
7. Revisi Ke-07 pada tanggal 30 Juli 2025 dikarenakan pengurangan Pagu Anggaran belanja barang sebesar Rp.38.880.000,- dan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
8. Revisi Ke-08 pada tanggal 1 September 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
9. Revisi Ke-09 pada tanggal 29 September 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
10. Revisi Ke-10 pada tanggal 3 Oktober 2025 dikarenakan pengurangan Pagu Anggaran belanja barang sebesar Rp.70.915.000,- dan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.

11. Revisi Ke-11 pada tanggal 14 Oktober 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
12. Revisi Ke-12 pada tanggal 24 Oktober 2025 dikarenakan pengurangan Pagu Anggaran belanja barang berupa perjalanan dinas yang di blokir sebesar Rp.8.800.000,- dan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
13. Revisi Ke-13 pada tanggal 14 November 2025 dikarenakan penambahan Pagu Anggaran belanja pegawai sebesar Rp.777.716.000,- dan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
14. Revisi Ke-14 pada tanggal 12 Desember 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025
(Revisi Ke-14)

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Setelah Revisi (Rp.)
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	2.970.000	2.970.000
Jumlah Pendapatan	2.970.000	2.970.000
Belanja		
Belanja Pegawai	8.310.178.000	9.118.494.000
Belanja Barang	1.309.635.000	1.172.080.000
Belanja Modal	200.500.000	200.500.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	9.820.613.000	10.491.074.000

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp.3.931.432,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.3.931.432,- atau mencapai 132,37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.2.970.000,-.

Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI No. 417/BUA.3/KU1.4/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Perubahan Penggunaan Kodefikasi Segmen Akun dalam Penyeteroran Sewa Rumah Dinas/ Negara dan Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung No. 424/BUA.3/KU1.1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Instruksi Perubahan Akun dalam Penyeteroran Sewa Rumah Dinas/ Negara dimana terjadi perubahan akun penyeteroran dari akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan menjadi 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi mulai dari Januari 2025. Pendapatan Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pendapatan Pendapatan Sewa Bangunan dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.638.000	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.970.000	2.293.352	77.22
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	80	-
Jumlah	2.970.000	3.931.432	132.37

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan Audited TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 32,38 persen dibandingkan Tahunan Audited 2024. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan lain selain dari pendapatan sewa rumah dinas, yaitu:

1. Adanya Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin berupa Mesin Antrian, UPS, Kursi Besi/ Metal, lemari Kayu, Televisi dan PC sebesar Rp. 1.638.000,-
2. Adanya Penerimaan Kembali Belanja tahun yang lalu berupa pengembalian akun pembulatan akibat kekurangan gaji sebesar Rp. 80,-

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahunan TA 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.638.000	-	100
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.293.352	2.969.808	(13,59)
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	80	-	100
Jumlah	3.931.432	2.969.808	32,38

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Rp.10.380.116.680,-*

Realisasi Belanja Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahunan Audited TA 2025 adalah sebesar Rp.10.380.116.680,- atau 98,94% dari anggaran belanja sebesar Rp.10.491.074.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan Audited TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahunan TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	9.118.494.000	9.007.701.382	98,78
Belanja Barang	1.172.080.000	1.171.927.086	99,99
Belanja Modal	200.500.000	200.488.540	99,99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	10.491.074.000	10.380.117.008	98,94
Pengembalian Belanja	-	328	-
Jumlah	10.491.074.000	10.380.116.680	98,94

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,14 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Pegawai sebesar 2,34% dikarenakan :
 - Adanya Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebanyak 20 pegawai mulai Januari s.d Desember 2025
 - Adanya Kenaikan Pangkat (KP) sebanyak 4 pegawai dan Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Pensiun sebanyak 4 pegawai mulai Januari s.d Desember 2025
 - Adanya Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional sebanyak 2 pegawai mulai Januari s.d Desember 2025
 - Adanya tambahan CPNS sebanyak 3 pegawai mulai Juni 2025
 - Adanya Kenaikan Tunjangan Hakim berdasarkan PP 44 Tahun 2024 sebanyak 11 pegawai
 - Adanya tambahan PPPK sebanyak 10 pegawai mulai September 2025

2. Menurunnya Belanja Barang sebesar 13,88% dikarenakan :
 - Menurunnya belanja sewa untuk rumah dinas Hakim dikarenakan adanya Hakim yang mutasi keluar dan pensiun
 - Menurunnya biaya perjalanan dinas akibat adanya efisiensi anggaran sehingga 50% dari pagu perjalanan dinas yang tidak dapat direalisasikan
 - Berkurangnya pagu anggaran belanja barang yang diambil oleh eselon 1
3. Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan anggaran belanja modal sebesar Rp.200.500.000,- terdiri dari :
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.138.000.000,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.62.500.000,-
4. Adanya pengembalian belanja sebesar Rp.328,- berupa belanja pembulatan gaji.

Perbandingan Realisasi Belanja
Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Pegawai	9.007.701.054	8.801.377.836	2,34
Belanja Barang	1.171.927.086	1.360.829.286	(13,88)
Belanja Modal	200.488.540	-	100
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	10.380.116.680	10.162.207.122	2,14

*Belanja
Pegawai
Rp.9.007.701.054,-*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.9.007.701.054,- dan Rp. 8.801.377.836,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan Audited TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,34% dibandingkan dengan Tahunan Audited TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- Adanya penyesuaian gaji atas Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebanyak 20 pegawai mulai Januari s.d Desember 2025
- Adanya penyesuaian gaji Kenaikan Pangkat (KP) sebanyak 4 pegawai dan Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Pensiun sebanyak 4 pegawai mulai Januari s.d Desember 2025
- Adanya penyesuaian gaji atas Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional sebanyak 2 pegawai mulai Januari s.d Desember 2025
- Adanya tambahan CPNS sebanyak 3 pegawai mulai Juni 2025
- Adanya penyesuaian gaji atas Kenaikan Tunjangan Hakim berdasarkan PP 44 Tahun 2024 sebanyak 11 pegawai
- Adanya tambahan PPPK sebanyak 10 pegawai mulai September 2025

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahunan 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.111.929.700	3.233.663.720	(3,76)
Beban Pembulatan Gaji PNS	39.641	41.007	(3,33)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	216.068.520	222.315.468	(2,81)
Beban Tunj. Anak PNS	54.435.828	59.414.128	(8,38)
Beban Tunj. Struktural PNS	33.840.000	33.330.000	(1,53)
Beban Tunj. Fungsional PNS	152.689.000	4.002.190.000	(96,18)
Beban Tunj. PPh PNS	21.261.640	635.718.366	(96,66)
Beban Tunj. Beras PNS	132.021.660	135.715.080	(2,72)
Beban Uang Makan PNS	416.115.000	443.079.000	(6,09)
Beban Tunjangan Umum PNS	40.190.000	36.325.000	10,64
Beban Uang Lembur	-	-	-
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	736.027.309	-	-
Beban Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	3.920.700.000	-	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	114.302.00	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.276	-	-
Belanja Tunj. Suami/ Istri PPPK	9.144.160	-	-
Belanja Tunj. Anak PPPK	2.743.248	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PPK	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PPPK	8.690.400	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	30.201.000	-	-
Belanja Tunj. Umum PPPK	7.300.000	-	-
Total Belanja Kotor	9.007.701.382	8.801.761.769	2,34
Pengembalian Belanja	328	383.933	-
Jumlah Belanja	9.007.701.054	8.801.377.836	2,34

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurunnya beban Gaji Pokok PNS, beban Pembulatan Gaji PNS, beban Tunjangan Suami/ Istri PNS beban Tunjangan Anak PNS, beban Tunjangan Beras PNS, beban Uang Makan PNS dikarenakan adanya Mutasi dan Pensiun Pegawai (Mutasi Hakim dan Cakim serta Pensiun

- Hakim) meskipun ada juga beberapa pegawai yang mendapatkan Kenaikan Pangkat, KGB dan penambahan CPNS.
2. Menurunnya beban Tunjangan Fungsional PNS sebesar 96,18% dikarenakan adanya pergeseran pembayaran tunjangan jabatan Hakim yang semula pada akun belanja Tunj. Fungsional PNS menjadi akun belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara.
 3. Menurunnya beban Tunjangan PPh PNS sebesar 96,66% dikarenakan adanya pergeseran pembayaran tunjangan PPh Hakim yang semula pada akun belanja Tunj. PPh PNS menjadi akun belanja Tunj. PPh Pejabat Negara.
 4. Meningkatnya beban Tunjangan Umum PNS sebesar 10,64% dikarenakan adanya penambahan CPNS sebanyak 3 pegawai.
 5. Adanya penambahan PPPK menyebabkan bertambahnya akun belanja PPPK.

B.4. Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp.1.171.927.086,-*

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.171.927.086,- dan Rp.1.360.829.286,-

Realisasi Belanja Barang Tahunan Audited TA 2025 mengalami penurunan sebesar 13,88 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahunan Audited TA 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Berkurangnya pagu anggaran belanja barang operasional perkantoran sebesar 11,32% dikarenakan pengangkatan PPNN menjadi PPPK sebanyak 10 orang pegawai sejak September 2025
2. Penurunan belanja jasa sebesar 25,16% dikarenakan berkurangnya pagu anggaran belanja sewa untuk sewa rumah dinas hakim

3. Penurunan belanja perjalanan dinas sebesar 73,5% dikarenakan adanya efisiensi anggaran sebesar 50% dari total pagu anggaran yang hingga akhir tahun 2025 tidak dibuka blokir sehingga tidak dapat direalisasikan. Atas sisa pagu tersebut, anggaran diambil kembali oleh MA.
4. Sebagian akun belanja barang mengalami pengurangan pagu anggaran oleh Eseon I di Mahkamah Agung yang digunakan untuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai satker.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahunan 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	582.268.915	656.607.018	(11,32)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000	-	-
Belanja Persediaan	29.946.000	35.316.900	(15,21)
Belanja Jasa	145.367.236	194.249.585	(25,16)
Belanja Pemeliharaan	407.513.855	452.653.683	(9,97)
Belanja Perjalanan Dinas	5.831.080	22.002.100	(73,5)
Jumlah Belanja Kotor	1.171.927.086	1.360.829.286	(13,88)
Pengembalian Belanja Barang		-	-
Jumlah Belanja	1.171.927.086	1.360.829.286	(13,88)

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.200.488.540,-

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.200.488.540,- dan Rp.0,-.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan pagu anggaran belanja modal sebesar Rp.200.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.138.000.000,-
2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp.62.500.000,-

Semester I Tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menyelenggarakan seluruh pengelolaan belanja modal tersebut.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	137.988.540	-	137.988.540	100
Belanja Modal Penambahan Gedung dan Bangunan	62.500.000	-	62.500.000	100
Total Belanja Kotor	200.488.540	-	200.488.540	100
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	200.488.540	-	200.488.540	100

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp.0,-

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahunan Audited TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Tanah/ Pengadaan Tanah pada Pengadilan Agama Yogyakarta dari kurun waktu Tahun 2025 dan 2024.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.137.988.540,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan Audited TA 2025 adalah sebesar Rp.137.988.540,- dimana Nilai tersebut mengalami perubahan bila dibandingkan dengan realisasi Tahunan Audited TA 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pagu anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin pada Tahun 2024.

Belanja Modal Peralatan dan mesin pada tahun 2025 berupa peralatan kantor terdiri dari : CCTV sebanyak 1 Paket; AC Split 2 PK sebanyak 5 Unit; AC Split 1 PK sebanyak 6 Unit; AC Standing sebanyak 1 Unit.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahunan (Audited) TA. 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)**

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
<i>Laptop</i>	-	-	-
<i>Peralatan Kantor</i>	137.988.540	-	-
<i>Pengolah Data</i>	-	-	-
<i>Jumlah Belanja Kotor</i>	137.988.540	-	100
<i>Pengembalian</i>	-	-	-
<i>Jumlah</i>	137.988.540	-	100

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.62.500.000,-*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan Audited TA 2025 dan Tahunan Audited TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.62.500.000,- dan Rp.0,- .

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan pagu Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan yaitu Pengadaan Pintu Otomatis Ruang Sidang sebanyak 2 Unit.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahunan (Audited) TA. 2025 dan 2024**

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
<i>Penambahan nilai gedung dan bangunan</i>	62.500.000	-	-
<i>Jumlah Belanja Kotor</i>	62.500.000	-	100
<i>Pengembalian</i>	-	-	-
<i>Jumlah</i>	62.500.000	-	100

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.0,-*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahunan Audited TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadilan Agama Yogyakarta dari kurun waktu Tahun 2025 dan 2024.

B.6. Belanja Bantuan Sosial

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp.0,-*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan Audited TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. Satker Pengadilan Agama Yogyakarta 401199 (DIPA 01) tidak menyelenggarakan pengelolaan belanja bantuan sosial di Tahunan Audited Tahun 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar
Rp.13.851.550,-*

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.13.851.550,- dan Rp.12.522.900,-

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/ TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

*Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah	0	0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0,-*

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Setiap uang tunai yang diterima oleh Bendahara Penerimaan disetorkan langsung ke kas negara secara rutin dan berkala dan Bendahara Penerimaan tidak memiliki akun rekening di Bank.

*Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah	0	0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp.0,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp.0,-

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA. 2025	TA. 2024
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp.0,-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA. 2025	TA. 2024
1.	Nihil	0	0
2.	Nihil	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA. 2025	TA. 2024
1.	Nihil	0	0
2.	Nihil	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Jk.
Pendek Rp.0,-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

*Beban Dibayar di Muka
Rp.0,-*

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel Rincian Beban Dibayar di Muka
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Uraian	TA. 2025	TA. 2024
Nihil	0	0
Jumlah	0	0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp.0,-*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Jenis	TA. 2025	TA. 2024
Pendapatan	0	0
Jumlah	0	0

C.1.10. Persediaan

Persediaan
Rp.13.851.550,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.13.851.550,- dan Rp. 12.522.900,- dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Persediaan
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Persediaan	TA. 2025	TA. 2024
Barang Konsumsi	10.494.300	10.085.900
Barang untuk Pemeliharaan	3.357.250	2.437.000
Suku Cadang	-	-
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	13.851.550	12.522.900

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap

Rp.48.389.246.947,-

Saldo Aset Tetap Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.48.389.246.947,- dan Rp.48.456.782.013,-.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Aset Tetap pada Pengadilan Agama Yogyakarta berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah

Rp.43.029.069.000,-

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.43.029.069.000,- dan Rp.43.029.069.000,-.

Tidak terdapat mutasi / perubahan pada nilai aset tetap Tanah. Adapun Rincian Tanah per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Rincian Aset Tanah TA. 2025 dan 2024 (dalam satuan Rupiah)

N o.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Rumah Dinas (KIB.1)	150 M2	13.05.13.04.00818	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	885.327.000
2.	Tanah Bangunan Rumah Dinas (KIB.2)	775 M2	13.05.13.05.01204	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	4.297.675.000
3.	Tanah Bangunan Gedung Kantor (KIB. 1)	1.860 M2	13.05.13.02.01077	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Gedung Kantor	19.233.247.000
4.	Tanah Bangunan Gedung Kantor (KIB.2)	1.800 M2	13.05.13.02.01076	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Gedung Kantor	18.612.820.000
Jumlah						43.029.069.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp.3.888.621.538,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.3.888.621.538,- dan Rp.33.668.761.998,-

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3.668.761.998
Mutasi Tambah :	
Pembelian	137.988.540
Hibah Barang	58.006.000
Transfer Masuk	23.865.000
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang :	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	3.888.621.538
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(3.573.618.556)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	315.002.982

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

1. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan mesin sebesar Rp.137.988.540,- berupa peralatan kantor terdiri dari :

Nama Barang	Jumlah Unit/ Paket	Nominal
AC 2 PK	5	59.995.500
AC 1 PK	6	38.997.630
AC Standing	1	26.996.310
CCTV	1	11.999.100
Total		137.988.540

2. Hibah Langsung berbentuk barang sesuai dengan Berita Acara Pengesahan MPHLBJS No.BA-35/KPN.1501/2025 dan SP3HL-BJS Nomor: 275/SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/IV/2025 dari PT. Media Sarana Data sebesar Rp.58.006.000,- berupa alat pengolah data terdiri dari :

Nama Barang	Jumlah Unit/ Paket	Nominal
Mini PC (Personal Computer	1	2.405.000
PC (Personal Computer)	2	22.100.000
Tablet	3	17.355.000
Televisi	2	16.146.000
Total		58.006.000

3. Transfer Masuk berupa 1 buah Scanner sebesar Rp.23.865.000,- dari Mahkamah Agung RI.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp.6.372.977.000,-*

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.6.372.977.000,- dan Rp.6.310.477.000,- . Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan pagu anggaran belanja Modal Penambahan Gedung dan Bangunan berupa Pembuatan Pintu Otomatis Ruang sidang sebanyak 2 unit sebesar Rp. 62.500.000,- .

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	6.310.477.000
Mutasi Tambah :	0
Pembelian	62.500.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	6.372.977.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.353.970.514)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.019.006.486

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.0,-*

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

Berdasarkan PMK No.29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara, Mahkamah Agung dan satker di bawahnya tidak mengelola jalan, irigasi dan jaringan.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp.26.168.479,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.26.168.479,- dan Rp.26.168.479,-.

Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	26.168.479
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2025	26.168.479
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	26.168.479

Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang untuk Aset tetap Lainnya.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0,-

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp.4.927.589.070,-)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp.4.927.589.070,-) dan (Rp.4.577.694.464,-)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Aset tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.888.621.538	(3.573.618.556)	315.005.982
2	Gedung dan Bangunan	6.372.977.000	(1.353.970.514)	5.019.006.486
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	26.168.479	-	26.168.479
	Akumulasi Penyusutan	10.287.767.017	(4.927.589.070)	5.360.180.947

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang
Rp.0,-

Piutang Jangka Panjang Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp.0,-

Saldo Aset Lainnya Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.25.839.200,-.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Yogyakarta terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Mutasi transaksi pengurangan Aset Lainnya berupa :

1. Dana yang dibatasi penggunaannya yaitu tagihan langganan internet bulan Desember 2024 senilai

Rp.16.000.000,- yang dibayarkan menggunakan mekanisme RPATA setelah berakhirnya masa kontrak di 31 Desember 2024. Pembayaran telah dilaksanakan pada awal Januari 2025.

2. Penghapusan/ Penjualan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp.103.475.500,- . Telah dilaksanakan lelang untuk barang-barang tersebut pada bulan Maret 2025.

C.4.1. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp.0,-*

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Yogyakarta berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-Lain
Rp.0,-*

Aset Lain-lain per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.103.475.500,- . Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	103.475.500
Mutasi Tambah :	
Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	103.475.500
Saldo per 31 Desember 2024	0

Mutasi transaksi pengurangan pada Aset Lain-lain merupakan barang milik negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan telah dilakukan proses penghapusan dan lelang barang pada bulan Maret 2025 senilai Rp.103.475.500,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Unit Lemari Kayu senilai Rp.14.000,- ;
- 1 Unit Mesin Antrian senilai Rp. 27.496.000,- ;
- 1 Unit Kursi Besi/ Metal senilai Rp.577.500,- ;
- 3 Unit Televisi senilai Rp. 28.300.000,- ;
- 2 Unit UPS senilai Rp. 5.068.000,- ;
- 4 Unit Personal Computer senilai Rp. 42.020.000,-

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan (Rp.93.636.300,-) .

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Pada tahun 2025, terjadi pengurangan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya dikarenakan telah selesainya proses penghapusan BMN.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp.1.247.547.705,-*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.1.247.547.705,- dan Rp. 22.158.858,-

Kewajiban Jangka Pendek terdiri berupa Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.1.247.547.705,- merupakan :

1. Belanja Barang yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran Langganan Telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp.89.750,-
2. Belanja Barang yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran Langganan Listrik bulan Desember 2025 sebesar Rp.14.017.764,-
3. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran kekurangan Gaji Induk bulan Oktober 2025 sebesar Rp.40.128.000,- untuk 1 orang Pegawai yang sudah Pensiun TMT 1 November 2025.
4. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran kekurangan Gaji Induk bulan Oktober s/d Desember 2025 sebesar Rp.1.193.312.191,- sebanyak 8 orang pegawai

*Tabel Rincian Kas Kewajiban Jangka Pendek
Tahunan 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Utang kepada Pihak Ketiga	1.247.547.705	22.158.858
Utang yang belum ditagihkan	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	1.247.547.705	22.158.858

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN Rp.0,-*

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih

berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Per 31 Desember 2025, bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Yogyakarta telah melakukan GUP Nihil sehingga saldo uang muka dari KPPN menjadi Rp.0,-.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.1.247.547.705,-*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.1.247.547.705,- dan Rp.22.158.858,- .

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.1.247.547.705,- merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran kekurangan gaji induk bulan Oktober 2025 sebesar Rp.40.128.000,- ; Belanja Pegawai yang masih harus dibayar yaitu Pembayaran kekurangan gaji induk bulan Oktober s.d Desember 2025 sebesar Rp.1.193.312.191,- dan Belanja Barang yang masih harus dibayar yaitu pembayaran langganan telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp.89.750,- serta pembayaran langganan listrik sebesar Rp.14.017.764,-

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp.0,-*

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut

bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0,-*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas
Rp.47.155.550.792,-*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.47.155.550.792,- dan Rp. 48.472.985.255,- .

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNB
Rp.2.293.352,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.2.293.352,- dan Rp.2.969.808,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Gedung, Tanah dan Bangunan	2.293.352	2.969.808	(22,78)
Jumlah	2.293.352	2.969.808	(22,78)

Saldo Pendapatan PNB sebesar Rp.2.293.352,- merupakan pembayaran sewa rumah dinas bulan Januari-Desember

2025. Pembayaran sewa rumah dinas dilaksanakan melalui potongan SPM Belanja Pegawai (Gaji Induk) pada setiap bulannya.

Terdapat penurunan pendapatan PNPB terkait sewa rumah dinas dikarenakan pada bulan Juli-September 2025 tidak tersewa/ ditempati karena pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta promosi dan mutasi jabatan.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp.10.235.128.222,-

Jumlah Beban Pegawai pada Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.10.235.128.222,- dan Rp.8.807.091.567,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian beban pegawai per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
<i>Beban Gaji Pokok</i>	3.225.479.300	3.234.236.920	(0,27)
<i>Beban Tunjangan-tunjangan</i>	6.563.219.341	5.129.736.705	27,94
<i>Beban Uang Makan</i>	446.316.000	443.079.000	0,73
<i>Beban Pembulatan Gaji</i>	41.581	38.942	6,78
<i>Beban Lembur</i>	-	-	-
<i>Jumlah Kotor</i>	10.235.128.222	8.807.091.567	16,21
<i>Pengembalian</i>	-	-	-
<i>Jumlah</i>	10.235.128.222	8.807.091.567	16,21

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 16,21% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan tambahan pegawai PPPK sebanyak 10 orang dan kenaikan tunjangan hakim berdasarkan PP 42 Tahun 2025 sejak Oktober 2025. Selain itu juga, adanya pegawai yang terjadwal kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat di tahun 2025.

Meskipun pada tahun 2024 juga terjadi banyak mutasi keluar Pengadilan Agama Yogyakarta baik yang pindah satker, pensiun BUP dan pensiun karena meninggal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp.18.236.400,-*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.18.236.400,- dan Rp.16.973.700,- .

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Persediaan
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	18.236.400	16.973.700	7,44
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	18.236.400	16.973.700	7,44

Beban persediaan pada Tahunan Audited Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,44% dibandingkan dengan Semester Tahun 2024. Hal ini dikarenakan penggunaan persediaan barang konsumsi yang lebih banyak oleh para pegawai.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.744.297.830,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.744.297.830,- dan Rp.851.369.695,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban keperluan Perkantoran	522.407.415	605.081.747	(13,66)
Beban Pengiriman Surat Dinas	41.500	268.345	(84,53)
Beban Honor Operasional Satker	59.820.000	50.400.000	18,69
Beban Barang Operasional Lainnya	-	856.926	-
Beban Langganan Telepon	1.131.151	1.122.677	0,75
Beban Langganan Listrik	14.017.764	-	-
Beban Sewa	144.180.000	193.140.000	(25,35)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.400.000	500.000	380
Beban Bahan	300.000	-	-
Jumlah Beban	744.297.830	851.369.695	(12,58)

Beban barang dan jasa pada Tahunan Audited Tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 12,58% dibandingkan Tahunan Tahun 2025. Hal ini dikarenakan :

1. Penurunan pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025

2. Munculnya beban langganan Listrik dikarenakan Pembayaran langganan listrik yang dikembalikan ke satker mulai Desember 2025, dibayarkan secara akrual
3. Bertambahnya beban aset ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya Hibah Barang yang nilai harga satuan barangnya dibawah kapitalis sehingga menjadikannya barang ekstrakomptabel/ tidak menjadi barang aset
4. Berkurangnya beban sewa rumah dinas untuk hakim dikarenakan adanya Promosi dan Mutasi Keluar Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga penggunaan sewa rumah dinas menjadi tidak maksimal.
5. Berkurangnya pengiriman surat dinas via Pos dan penggunaan langganan telepon dikarenakan komunikasi Pengadilan Agama Yogyakarta sudah bersifat paperless dan lebih banyak menggunakan media sosial Pengadilan Agama Yogyakarta (Instagram, Facebook, Website) maupun chat melalui Aplikasi Whatsaap.
6. Berkurangnya beban keperluan perkantoran dikarenakan adanya pengangkatan PPNP menjadi PPPk sebanyak 10 orang
7. Munculnya beban bahan yang diperuntukkan untuk penjilidan laporan

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp.417.894.805,-*

Beban Pemeliharaan Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.417.894.805,- dan Rp.462.186.683,- .

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Rincian Beban Pemeliharaan
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235.548.310	281.681.351	(16,38)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.183.000	5.184.000	(0,02)
Beban Peralatan dan Mesin	166.782.545	165.788.332	0,60
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	10.380.950	9.533.000	8,89
Jumlah Beban	417.894.805	462.186.683	(9,58)

Beban pemeliharaan pada Tahunan Audited Tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 9,58% dibandingkan Tahunan Audited tahun 2024. Hal ini dikarenakan :

1. Penurunan beban pemeliharaan gedung dan bangunan dikarenakan pagu anggaran belanja pemeliharaan yang dikurangi dari tahun 2024
2. Peningkatan beban peralatan dan mesin dikarenakan beberapa peralatan dan mesin (computer, laptop, AC, TV maupun kendaraan) yang harus dilakukan perbaikan dan pemeliharaan diluar jadwal service rutinnya.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp.5.831.080,-*

Beban Perjalanan Dinas Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5.831.080,- dan Rp.22.022.100,- . Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.831.080	22.002.100	(73,50)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Jumlah Beban	5.831.080	22.002.100	(73,50)

Beban Perjalanan Dinas pada Tahunan Audited TA. 2025 mengalami mengalami penurunan sebesar 73,50 persen dibandingkan pada tahunan Audited TA. 2025. Hal ini dikarenakan adanya pemblokiran 50% pagu anggaran untuk perjalanan dinas dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Pemblokiran tersebut sampai akhir tahun 2025 belum dapat dicairkan/ direalisasikan, sehingga untuk nominal tersebut pagu anggaran diambil kembali oleh Eselon 1 Mahkamah Agung RI.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp.0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp.0,-

Beban Bantuan Sosial Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-
Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.349.894.606,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.349.894.606,- dan Rp. 342.978.279,- .

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	188.734.206	178.709.873	5,61
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	161.160.400	159.348.806	1,14
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Jumlah Beban	349.894.606	342.978.279	2,02

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahunan Audited TA. 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,02 persen dibandingkan pada TA. 2024. Hal ini dikarenakan

adanya peningkatan pada beban penyusutan peralatan dan mesin serta beban penyusutan gedung dan bangunan.

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp.0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

D.11. Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non
Operasional
(Rp.8.201.120,-)*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp.8.201.120,-) dan Rp.0,- .

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahunan TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset	(8.201.200)	-	(100)
Surplus/ Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional Lainnya	80	-	100
Jumlah Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional	(8.201.120)	-	(100)

Jumlah Defisit kegiatan non operasional meningkat dikarenakan adanya defisit pelepasan aset karena penghapusan melalui lelang dan adanya pengembalian belanja pegawai tahun 2025 karena kekurangan gaji.

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.48.472.985.255,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.48.472.985.255,- dan Rp.48.776.150.157,-

E.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit LO
(Rp.11.777.190.711,-)

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp.11.777.190.711,- dan defisit Rp.10.499.632.216,-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi
Rp.0,-

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,-.

E.4. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset Rp.0,-

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.4.1. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,-*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

E.4.2. Selisih Revaluasi Aset

*Selisih Revaluasi
Aset Rp.0,-*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

E.4.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp.0,-*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- . Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terjadi koreksi nilai terhadap aset.

E.4.4. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain
Rp.0,-*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp.10.459.756.248,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.10.459.756.248,- dan Rp.10.196.467.314,-

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Transaksi Antar Entitas
Tahunan TA 2025*

Uraian	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(3.931.432)
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.380.116.680
Transfer Masuk	23.865.000
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	59.706.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	10.459.756.248

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp.3.931.432,-) sedangkan DKEL sebesar Rp.10.380.116.680,-

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.23.865.000,- yaitu 1 unit scanner. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,-

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.59.706.000,- . Adapun Hibah tersebut merupakan hibah perseorangan berupa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pengesahan MPHLBJS Nomor : BA-35/KPN.1501/2025 tentang persetujuan Hibah Langsung bentuk barang berharga dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP3HL-BJS) No. 275/SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/IV/2025 tanggal 22 April 2025 dari PT Media Sarana Data senilai Rp.58.006.000,- berupa alat pengolah data dengan rincian :

Nama Barang	Jumlah Unit/ Paket	Nominal
Mini PC (Personal Computer	1	2.405.000
PC (Personal Computer)	2	22.100.000
Tablet	3	17.355.000
Televisi	2	16.146.000
Total		58.006.000

2. Berdasarkan Berita Acara Pengesahan MPHLBJS Nomor : BA-02/KPN.1501/2026 tentang persetujuan Hibah Langsung bentuk barang berharga dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP3HL-BJS) No. 789/SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp.1.700.000,- berupa loker besi 4 pintu sejumlah 2 unit.

E.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.447.155.550.792,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.47.155.550.792,- dan Rp.48.472.985.255,- .

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Dilakukan Jurnal Manual dikarenakan :

Adanya Kekurangan Gaji Induk bulan Oktober s.d Desember 2025 dan akan dibayarkan secara akrual di tahun 2026 ketika pagu anggaran telah siap. Sehingga, dilakukan jurnal manual akun 511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (D) pada akun 212111 Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp.914.100.000,-

Adanya Kekurangan Gaji Induk bulan Oktober 2025 bagi 1 orang pegawai yang telah Pensiun TMT 1 November 2025 dan akan dibayarkan secara akrual di tahun 2026. Sehingga, dilakukan jurnal manual akun 511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (D) pada akun 212111 Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp.35.200.000,-

F.2. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan

Rekening Virtual sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, yaitu : Penampung DIPA BUA Rekening Virtual pada BRI Cabang Katamso Yogyakarta a.n. BPG 030 Satker Pengadilan Agama Yogyakarta QQ 01 Nomor : 653244011991000 dengan saldo akhir per 31 Desember 2026 sebesar Rp. 0,-

F.3. Revisi DIPA

Informasi mengenai Revisi DIPA 005.01.2.401199/2025 sampai dengan bulan Desember 2025 sudah dilakukan sebanyak 14 kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi Ke-01 pada tanggal 10 Januari 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK yaitu pergeseran akun untuk pembayaran tunjangan Hakim dari akun 511124 Tunjangan Fungsional PNS menjadi 511339 Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara dan pergeseran akun untuk pembayaran PPh 21 dari akun 511125 Tunjangan PPh PNS menjadi 511324 PPh Pejabat Negara.
2. Revisi Ke-02 pada tanggal 23 Februari 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan pemblokiran akun 532111, 533121, 521111, 521114, 521115, 521252, 521811, 522141, 523111, 523119, 523121, 521211 dikarenakan adanya efisiensi anggaran secara nasional.
3. Revisi Ke-03 pada tanggal 28 Februari 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
4. Revisi Ke-04 pada tanggal 23 Maret 2025 dikarenakan adanya pembukaan blokir efisiensi anggaran akun 532111, 533121, 521111, 521114, 521115, 521252, 521811, 522141, 523111, 523119, 523121, 521211.

5. Revisi Ke-05 pada tanggal 21 April 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
6. Revisi Ke-06 pada tanggal 26 Juni 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
7. Revisi Ke-07 pada tanggal 30 Juli 2025 dikarenakan pengurangan Pagu Anggaran belanja barang sebesar Rp.38.880.000,- dan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
8. Revisi Ke-08 pada tanggal 1 September 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
9. Revisi Ke-09 pada tanggal 29 September 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
10. Revisi Ke-10 pada tanggal 3 Oktober 2025 dikarenakan pengurangan Pagu Anggaran belanja barang sebesar Rp.70.915.000,- dan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
11. Revisi Ke-11 pada tanggal 14 Oktober 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
12. Revisi Ke-12 pada tanggal 24 Oktober 2025 dikarenakan pengurangan Pagu Anggaran belanja barang berupa perjalanan dinas yang di blokir sebesar Rp.8.800.000,- dan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.
13. Revisi Ke-13 pada tanggal 14 November 2025 dikarenakan penambahan Pagu Anggaran belanja pegawai sebesar Rp.777.716.000,- dan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.

14. Revisi Ke-14 pada tanggal 12 Desember 2025 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK.

F.4. Ralat SPM, SSBP, SSPB

Dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 terdapat ralat sebanyak 7 SPM yang disebabkan sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan aturan mengenai akun sewa rumah dinas yang sebelumnya akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan menjadi akun 425151 Pendapatan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi.
- b. Adanya perubahan pembayaran tunjangan Hakim dari akun 5111124 Tunjangan Fungsional menjadi akun 511339 Tunjangan Pejabat Negara, dan akun 5111126 Tunjangan PPh PNS menjadi akun 511324 Tunjangan PPh Pejabat Negara.

F.5 Catatan Penting Lainnya

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 47/SEK/SK.KUI1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025 menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Yogyakarta dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Agama Yogyakarta

Nomor : 669/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 menunjuk :

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Taslim, SH
 Pejabat Pembuat Komitmen : Verawati Widjaya, S.H.
 Pejabat PPSPM : Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.
 Bendahara Pengeluaran : Arina Rahmانيar, S.Kom.
 Bendahara Penerimaan : Novialita Pitaloka, S.T.

2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/ Prioritas Nasional/ Program Utama.

Pengadilan Agama Yogyakarta tidak memiliki Kegiatan yang termasuk dalam program Prioritas (PN) Kabinet Merah Putih. Yang dikelola oleh DIPA BUA (01) Pengadilan Agama Yogyakarta hanya Kegiatan Operasional dan Non Operasional Perkantoran yang merupakan kegiatan rutin.

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, Capaian Output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliable untuk mengukur perkembangan output belanja uang dikelola Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Capaian Rincian Output Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 diambil dari Monev PA Adalah sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Output	Realisasi Anggaran	Presentase Realisasi Anggaran	Rencana Output	Realisasi Output	Satuan Output	Presentase Capaian Output
WA.6986.EBA.962	700.000	100	1	1	Laporan	100
WA.6986.EBA.994	10.139.847.468	100	1	1	Layanan	100
WA.1071.EBB.951	137.988.540	100	1	1	Unit	100
WA.1071.EBB.971	62.500.000	100	1	1	Unit	100
WA.6986.EBD.953	300.000	100	1	1	Dokumen	100

LAPORAN PENDUKUNG



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

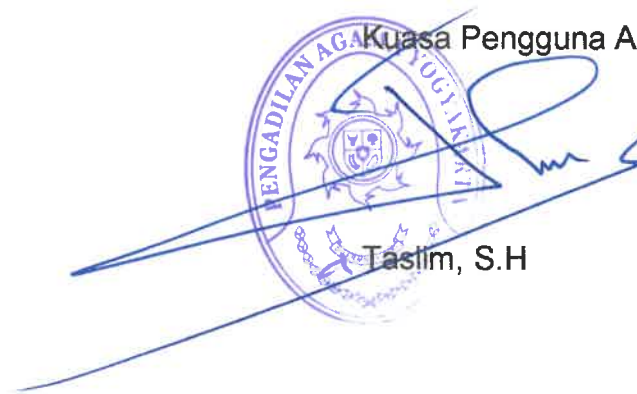
Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
www.pa-yogyakarta.go.id, pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : 414/SEK.W12-A1/KU2.1/V/2026
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Pengiriman Laporan Keuangan
TA. 2025 Audited

Yogyakarta, 6 Mei 2026

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di Yogyakarta

Bersama ini kami kirimkan Laporan Keuangan Tingkat Satker periode Tahun Anggaran 2025 Audited pada satker Pengadilan Agama Yogyakarta (401199 dan 401201).
Demikian disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

Taslim, S.H

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN AUDITED TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (401199) Pengadilan Agama Yogyakarta

Kode dan Nama UAPPAW : (0400) DI Yogyakarta

Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Badan Urusan Administrasi

Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		✓
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓

3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembalian Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembalian Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		N/A	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		N/A	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak

13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	√		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		N/A	Ya

Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		N/A	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		N/A	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)		N/A	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak

4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		N/A	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		N/A	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		N/A	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		N/A	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,		N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213		N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan		N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Muhammad Arief Jauhari, SAP
NIP. 197802272006041002

Yogyakarta, 27 Februari 2026
Penelaah,



Novialita Pitaloka, S.T.
NIP. 198611262011012011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 401199

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:33 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,970,000	3,931,432	961,432	132	2,970,000	2,969,808	192	100
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,970,000	3,931,432	961,432	132	2,970,000	2,969,808	192	100
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,970,000	3,931,432	961,432	132	2,970,000	2,969,808	192	100
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	10,491,074,000	10,380,116,680	(110,957,320)	99	10,255,808,000	10,162,207,122	93,600,878	99
1. Belanja Pegawai	9,118,494,000	9,007,701,054	(110,792,946)	99	8,889,621,000	8,801,377,836	88,243,164	99
2. Belanja Barang	1,172,080,000	1,171,927,086	(152,914)	100	1,366,187,000	1,360,829,286	5,357,714	100
3. Belanja Modal	200,500,000	200,488,540	(11,460)	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 401199

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:33 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	10,491,074,000	10,380,116,680	(110,957,320)	99	10,255,808,000	10,162,207,122	93,600,878	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH

NIP.197004231995031001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 401199 **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/26 3:34 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,638,000	0	1,638,000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2,970,000	2,293,352	0	2,293,352	77.22
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	2,970,000	3,931,352	0	3,931,352	132.37
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	80	0	80	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	80	0	80	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,970,000	3,931,432	0	3,931,432	132.37
	JUMLAH PENDAPATAN	2,970,000	3,931,432	0	3,931,432	132.37

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 401199 **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 3:34 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,094,672,000	3,112,929,000	3,111,929,700	0	3,111,929,700	99.97	999,300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45,000	45,000	39,641	328	39,313	87.36	5,687
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	178,955,000	216,071,000	216,068,520	0	216,068,520	100	2,480
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	98,097,000	55,097,000	54,435,828	0	54,435,828	98.8	661,172
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	35,000,000	33,840,000	0	33,840,000	96.69	1,160,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,709,662,000	153,170,000	152,689,000	0	152,689,000	99.69	481,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	555,290,000	22,158,000	21,261,640	0	21,261,640	95.95	896,360
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	119,723,000	132,223,000	132,021,660	0	132,021,660	99.85	201,340
511129	Belanja Uang Makan PNS	492,904,000	441,904,000	416,115,000	0	416,115,000	94.16	25,789,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,510,000	40,650,000	40,190,000	0	40,190,000	98.87	460,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	8,310,178,000	4,209,247,000	4,178,590,989	328	4,178,590,661	99.27	30,656,339
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	777,832,000	736,027,309	0	736,027,309	94.63	41,804,691
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	3,954,300,000	3,920,700,000	0	3,920,700,000	99.15	33,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	4,732,132,000	4,656,727,309	0	4,656,727,309	98.41	75,404,691
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	115,000,000	114,302,000	0	114,302,000	99.39	698,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	15,000	2,276	0	2,276	15.17	12,724
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	10,000,000	9,144,160	0	9,144,160	91.44	855,840
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3,000,000	2,743,248	0	2,743,248	91.44	256,752
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	500,000	0	0	0	0	500,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	9,000,000	8,690,400	0	8,690,400	96.56	309,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	31,600,000	30,201,000	0	30,201,000	95.57	1,399,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	8,000,000	7,300,000	0	7,300,000	91.25	700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	177,115,000	172,383,084	0	172,383,084	97.33	4,731,916
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	8,310,178,000	9,118,494,000	9,007,701,382	328	9,007,701,054	98.78	110,792,946
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	598,625,000	522,450,000	522,407,415	0	522,407,415	99.99	42,585
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,800,000	42,000	41,500	0	41,500	98.81	500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	59,820,000	59,820,000	59,820,000	0	59,820,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	660,245,000	582,312,000	582,268,915	0	582,268,915	99.99	43,085

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 401199 **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 3:34 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	700,000	0	700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,430,000	29,946,000	29,946,000	0	29,946,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	32,430,000	29,946,000	29,946,000	0	29,946,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	3,000,000	1,188,000	1,187,236	0	1,187,236	99.94	764
522141	Belanja Sewa	198,000,000	144,199,000	144,180,000	0	144,180,000	99.99	19,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	201,000,000	145,387,000	145,367,236	0	145,367,236	99.99	19,764
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	213,800,000	235,578,000	235,548,310	0	235,548,310	99.99	29,690
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,184,000	5,184,000	5,183,000	0	5,183,000	99.98	1,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,676,000	166,829,000	166,782,545	0	166,782,545	99.97	46,455
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	397,660,000	407,591,000	407,513,855	0	407,513,855	99.98	77,145
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,600,000	5,844,000	5,831,080	0	5,831,080	99.78	12,920
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	17,600,000	5,844,000	5,831,080	0	5,831,080	99.78	12,920
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,309,935,000	1,172,080,000	1,171,927,086	0	1,171,927,086	99.99	152,914
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138,000,000	138,000,000	137,988,540	0	137,988,540	99.99	11,460
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	138,000,000	138,000,000	137,988,540	0	137,988,540	99.99	11,460
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	62,500,000	62,500,000	62,500,000	0	62,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	62,500,000	62,500,000	62,500,000	0	62,500,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	200,500,000	200,500,000	200,488,540	0	200,488,540	99.99	11,460
	JUMLAH BELANJA	9,820,613,000	10,491,074,000	10,380,117,008	328	10,380,116,680	98.94	110,957,320

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:33 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	13,851,550	12,522,900	1,328,650	10.61
JUMLAH ASET LANCAR	13,851,550	12,522,900	1,328,650	10.61
ASET TETAP				
Tanah	43,029,069,000	43,029,069,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,888,621,538	3,668,761,998	219,859,540	5.99
Gedung dan Bangunan	6,372,977,000	6,310,477,000	62,500,000	0.99
Aset Tetap Lainnya	26,168,479	26,168,479	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,927,589,070)	(4,577,694,464)	(349,894,606)	7.64
JUMLAH ASET TETAP	48,389,246,947	48,456,782,013	(67,535,066)	(0.14)
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	16,000,000	(16,000,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	0	103,475,500	(103,475,500)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(93,636,300)	93,636,300	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	25,839,200	(25,839,200)	(100.00)
JUMLAH ASET	48,403,098,497	48,495,144,113	(92,045,616)	(0.19)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,247,547,705	22,158,858	1,225,388,847	5,530.02
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,247,547,705	22,158,858	1,225,388,847	5,530.02
JUMLAH KEWAJIBAN	1,247,547,705	22,158,858	1,225,388,847	5,530.02
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	47,155,550,792	48,472,985,255	(1,317,434,463)	(2.72)
JUMLAH EKUITAS	47,155,550,792	48,472,985,255	(1,317,434,463)	(2.72)
JUMLAH EKUITAS	47,155,550,792	48,472,985,255	(1,317,434,463)	(2.72)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	48,403,098,497	48,495,144,113	(92,045,616)	(0.19)

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH

NIP 197961231995031001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : 0400

DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : 401199

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 05/05/2026 3:34 PM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	10,085,900	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,437,000	0
0.0	131111	Tanah	43,029,069,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,668,761,998	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,310,477,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	26,168,479	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,384,884,350
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,192,810,114
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	16,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	103,475,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	93,636,300
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	6,013,023
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	145,835
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	16,000,000
0.0	391111	Ekuitas	0	48,472,985,255
JUMLAH			53,166,474,877	53,166,474,877

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:33 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	10,494,300	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,357,250	0
0.0	131111	Tanah	43,029,069,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,888,621,538	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,372,977,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	26,168,479	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,573,618,556
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,353,970,514
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,233,440,191
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	14,107,514
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,380,116,680
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,931,432	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	23,865,000
0.0	391111	Ekuitas	0	48,472,985,255
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	59,706,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,638,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,293,352
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	80
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,111,177,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	39,305	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	215,993,280	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	54,425,796	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	33,840,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	148,789,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	19,986,297	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	132,021,660	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	416,115,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	40,190,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,020,167,500	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	4,870,000,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	114,302,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,276	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	9,144,160	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,743,248	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	8,690,400	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	30,201,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	7,300,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	522,407,415	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:33 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	59,820,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,400,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	14,017,764	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,131,151	0
3.0	522141	Beban Sewa	144,180,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235,548,310	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,183,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166,782,545	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,831,080	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	188,734,206	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	161,160,400	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	18,236,400	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	10,380,950	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	9,839,200	0
JUMLAH			65,115,741,142	65,115,741,142

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH

NIP. 197001231995031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:33 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	10,380,116,680
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,931,432	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,638,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,293,352
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	80
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,111,929,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39,641	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	216,068,520	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	54,435,828	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	33,840,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	152,689,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	21,261,640	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	132,021,660	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	416,115,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	40,190,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	736,027,309	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,920,700,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	114,302,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,276	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9,144,160	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,743,248	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,690,400	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	30,201,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,300,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	522,407,415	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	59,820,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29,946,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,187,236	0
3.0	522141	Belanja Sewa	144,180,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235,548,310	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,183,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166,782,545	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,831,080	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137,988,540	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	62,500,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:33 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	328
JUMLAH			10,384,048,440	10,384,048,440

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH

197001231995031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:33 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,293,352	2,969,808	(676,456)	(22.778)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,293,352	2,969,808	(676,456)	(22.778)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,293,352	2,969,808	(676,456)	(22.778)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	10,235,128,222	8,807,091,567	1,428,036,655	16.215
Beban Persediaan	18,236,400	16,973,700	1,262,700	7.439
Beban Barang dan Jasa	744,297,830	851,369,695	(107,071,865)	(12.576)
Beban Pemeliharaan	417,894,805	462,186,683	(44,291,878)	(9.583)
Beban Perjalanan Dinas	5,831,080	22,002,100	(16,171,020)	(73.498)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:33 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	349,894,606	342,978,279	6,916,327	2.017
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	11,771,282,943	10,502,602,024	1,268,680,919	12.08
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(11,768,989,591)	(10,499,632,216)	(1,269,357,375)	12.09
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(8,201,200)	0	(8,201,200)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	1,638,000	0	1,638,000	
Beban Pelepasan Aset	9,839,200	0	9,839,200	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	80	0	80	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	80	0	80	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(8,201,120)	0	(8,201,120)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11,777,190,711)	(10,499,632,216)	(1,277,558,495)	12.168
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(11,777,190,711)	(10,499,632,216)	(1,277,558,495)	12.168

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

IASLIM, SH

NIP 197001231995031001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:33 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	48,472,985,255	48,776,150,157	(303,164,902)	(0.62)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(11,777,190,711)	(10,499,632,216)	(1,277,558,495)	12.17
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10,459,756,248	10,196,467,314	263,288,934	2.58
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,317,434,463)	(303,164,902)	(1,014,269,561)	334.56
EKUITAS AKHIR	47,155,550,792	48,472,985,255	(1,317,434,463)	(2.72)

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH

NIP.197601231995031001



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-005.01.2.401199/2025

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL

KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Alamat dan No Telp .

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00022/DRPP/401199/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	19.580.000,00	118.474.263,00	138.054.263,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	19.580.000,00	118.474.263,00	138.054.263,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	19.580.000,00	108.724.263,00	128.304.263,00	0,00
	1. BP UP*)	19.580.000,00	55.924.924,00	75.504.924,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	41.226.000,00	41.226.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	5.917.339,00	5.917.339,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	5.656.000,00	5.656.000,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasas Pengguna Anggaran

FASLIM, SH
NIP 197001231995031001

KAB. BANTUL, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran

ARINA R. HMANIAR, S.KOM
NIP. 198904202011012010

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 653244011991000 dengan postal saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00022/DRPP/401199/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3 Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	0,00
2 Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4 Saldo Pajak	Rp.	0,00
5 Saldo Hibah	Rp.	0,00
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
------------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B. Selisih Kas (I.A.-II.A.3)	Rp.	0,00
------------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	0,00
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2 a. Saldo TUP	Rp.	0,00
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3 Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
--	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


ARINA RAHMANTAR, S.KOM
NIP. 199304202011012010

Mengesahui
Kepala Pengeluaran Anggaran


ASLIM SH
NIP. 197801291995031001

Ditandatangani pada tanggal 05 Januari 2025

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 401199

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	653244011991000	BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA QQ 01	BRI Cabang Yogyakarta Katamso	20	S-2732/WPB.12/KP 06/2020	16-10-2020	2025-12-31	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



ARINA HMANIAR, S.KOM

NIP. 198904202011012010

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2025

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA40119900-
 No Rekening : 653244011991000
 Nama Rekening : BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA QQ 01
 Nama Bank : BRI Cabang Yogyakarta Katamso
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2025			15.025.286,00
02-12-2025	00162/BP/401199/2025	pungut pajak PPN tanggung renteng dan Pph 22	394.144,00	0,00	15.419.430,00
02-12-2025	00156/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final - PPK	217.500,00	0,00	15.636.930,00
02-12-2025	00155/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final - KPA	170.250,00	0,00	15.807.180,00
02-12-2025	00157/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final - PPSPM	30.000,00	0,00	15.837.180,00
02-12-2025	00158/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final - Benlu	26.000,00	0,00	15.863.180,00
02-12-2025	00159/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final - Benma	25.000,00	0,00	15.888.180,00
02-12-2025	00161/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final - Staf Keu	19.500,00	0,00	15.907.680,00
02-12-2025	00160/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final - Staf Keu	19.500,00	0,00	15.927.180,00
02-12-2025	00342/KW/401199/2025	Blaya pemeliharaan halaman berupa penggantian lampu taman sebanyak 7 pcs, BAST No. 719/SEK.W12-A1/PL1.1.6/XI/2025 tanggal 28-11-2025	0,00	3.500.000,00	12.427.180,00
02-12-2025	00336/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (PPK) bulan	0,00	1.450.000,00	10.977 180,00

1	2	3	4	5	6
		November 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025			
02-12-2025	00335/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (KPA) bulan November 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	1 135.000,00	9.842.180,00
02-12-2025	00337/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (PPSPM) bulan November 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	600.000,00	9.242.180,00
02-12-2025	00338/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Bendahara Pengeluaran) bulan November 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	520.000,00	8.722.180,00
02-12-2025	00339/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Pengelola PNPB) bulan November 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	500.000,00	8.222.180,00
02-12-2025	00340/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Staf Anggaran) bulan November 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	390.000,00	7.832.180,00
02-12-2025	00341/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Staf Anggaran) bulan November 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	390.000,00	7.442.180,00
02-12-2025	00157/SSP/401199/2025	setor PPN tanggung renteng	0,00	346.847,00	7.095.333,00

1	2	3	4	5	6
02-12-2025	00150/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	217.500,00	6.877.833,00
02-12-2025	00149/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	170.250,00	6.707.583,00
02-12-2025	00156/SSP/401199/2025	setor pph 21 jasa	0,00	47.297,00	6.660.286,00
02-12-2025	00151/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	30.000,00	6.630.286,00
02-12-2025	00152/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	26.000,00	6.604.286,00
02-12-2025	00153/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	25.000,00	6.579.286,00
02-12-2025	00154/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	19.500,00	6.559.786,00
02-12-2025	00155/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	19.500,00	6.540.286,00
03-12-2025	FPK-PENG-pOkqgUTjldfA2c	TUP Uang Makan Desember 2025	41.226.000,00	0,00	47.766.286,00
03-12-2025	00164/BP/401199/2025	Pungut PPN servis AB 1303 UH	403.815,00	0,00	48.170.101,00
03-12-2025	00163/BP/401199/2025	Pungut Pph 23 servis AB 1303 UH	40.385,00	0,00	48.210.486,00
03-12-2025	00343/KW/401199/2025	Biaya pemeliharaan mobil dinas AB 1303 UH berupa servis berkala, ganti oli, servis AC, dll	0,00	4.074.866,00	44.135.620,00
03-12-2025	00159/SSP/401199/2025	setor PPN	0,00	403.815,00	43.731.805,00
03-12-2025	00158/SSP/401199/2025	setor pph 23	0,00	40.385,00	43.691.420,00
04-12-2025	FPK-PENG-YC6dE4FMgsVwLJh	[DARI TUNAI] PU Bank via ATM	0,00	2.450.000,00	41.241.420,00
05-12-2025	FPK-PENG-hpgu8mQa7f9LgDJ	GUP TUNAI XIX NOVEMBER	19.955.866,00	0,00	61.197.286,00
08-12-2025	FPK-PENG-psl6lOkAfcOpPg2	GUP KKP XIX DESEMBER	18.572.208,00	0,00	79.769.494,00
08-12-2025	FPK-PENG-0XqLwVs4woaAgCU	Pembayaran atas SPM GUP KKP XIX Desember	0,00	18.572.208,00	61.197.286,00
15-12-2025	FPK-PENG-HH8Afo8Cx0fU2IM	GUP KKP XX DESEMBER 2025	17.396.850,00	0,00	78.594.136,00

1	2	3	4	5	6
15-12-2025	FPK-PENG-Hue5reefhhozSrE	[DARI TUNAI] PU Bank via ATM	0,00	7.300.000,00	71.294.136,00
16-12-2025	00166/BP/401199/2025	pungut PPN dan Pph 22	251.267,00	0,00	71.545.403,00
16-12-2025	00353/KW/401199/2025	Pembelian ATK dan Kebersihan bulan Desember 2025	0,00	2.231.250,00	69.314.153,00
16-12-2025	00163/SSP/401199/2025	setor PPN dan pph 22 ATK	0,00	251.267,00	69.062.886,00
17-12-2025	FPK-PENG-kq9bi6LBYz0ETZv	TM - Uang Transport Hakim bulan November 2025	5.656.000,00	0,00	74.718.886,00
18-12-2025	FPK-PENG-WoqLWGUx62vYA3W	Pembayaran tagihan KKP atas SPM GUP KKP XX Desember 2025	0,00	17.396.850,00	57.322.036,00
18-12-2025	FPK-PENG-DS5gJMNMcKZB4NH	TK - Uang Transport Hakim bulan November 2025	0,00	5.656.000,00	51.666.036,00
23-12-2025	00169/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final	217.500,00	0,00	51.883.536,00
23-12-2025	00168/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final	170.250,00	0,00	52.053.786,00
23-12-2025	00170/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final	30.000,00	0,00	52.083.786,00
23-12-2025	00171/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final	26.000,00	0,00	52.109.786,00
23-12-2025	00172/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final	25.000,00	0,00	52.134.786,00
23-12-2025	00173/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final	19.500,00	0,00	52.154.286,00
23-12-2025	00174/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final	19.500,00	0,00	52.173.786,00
23-12-2025	00175/BP/401199/2025	pungut pajak pph 23	6.000,00	0,00	52.179.786,00
23-12-2025	00361/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (PPK) bulan Desember 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	1.450.000,00	50.729.786,00
23-12-2025	00360/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (KPA) bulan Desember 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	1.135.000,00	49.594.786,00
23-12-2025	00362/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (PPSPM) bulan	0,00	600.000,00	48.994.786,00

1	2	3	4	5	6
		Desember 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025			
23-12-2025	00363/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Bendahara Pengeluaran) bulan Desember 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	520.000,00	48.474.786,00
23-12-2025	00364/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Pengelola PNPB) bulan Desember 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	500.000,00	47.974.786,00
23-12-2025	00365/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Staf Anggaran) bulan Desember 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	390.000,00	47.584.786,00
23-12-2025	00366/KW/401199/2025	Biaya operasional satuan kerja berupa pembayaran honor pengelola (Staf Anggaran) bulan Desember 2025 berdasarkan SK KPA No. 628/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 01-10-2025	0,00	390.000,00	47.194.786,00
23-12-2025	00368/KW/401199/2025	Biaya keperluan perkantoran berupa pembayaran jasa angkut sampah bulan Desember 2025	0,00	300.000,00	46.894.786,00
23-12-2025	00166/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	217.500,00	46.677.286,00
23-12-2025	00165/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	170.250,00	46.507.036,00
23-12-2025	00167/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	30.000,00	46.477.036,00
23-12-2025	00168/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	26.000,00	46.451.036,00
23-12-2025	00169/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	25.000,00	46.426.036,00

1	2	3	4	5	6
	5				
23-12-2025	00170/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	19.500,00	46.406.536,00
23-12-2025	00171/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	19.500,00	46.387.036,00
23-12-2025	00172/SSP/401199/2025	setor pph 23	0,00	6.000,00	46.381.036,00
29-12-2025	00176/BP/401199/2025	pungut pajak PPN tanggung renteng dan pph 21 jasa	363.648,00	0,00	46.744.684,00
29-12-2025	00369/KW/401199/2025	Biaya keperluan perkantoran berupa pencetakan stopmap kantor sebanyak 300 pcs	0,00	2.990.000,00	43.754.684,00
29-12-2025	00002/SSBP/401199/2025	Pengembalian UP Non Tunai 401199 Desember 2025	0,00	2.165.036,00	41.589.648,00
29-12-2025	00174/SSP/401199/2025	setor PPN tanggung renteng	0,00	296.306,00	41.293.342,00
29-12-2025	00173/SSP/401199/2025	setor pph 21 jasa	0,00	67.342,00	41.226.000,00
29-12-2025	FPK-PENG-CgH5Jlzgcw1qWb8	GUP NIHIL DESEMBER 2025	0,00	0,00	41.226.000,00
31-12-2025	00177/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final	2.524.650,00	0,00	43.750.650,00
31-12-2025	00178/BP/401199/2025	pungut pajak pph 21 final	188.700,00	0,00	43.939.350,00
31-12-2025	00374/KW/401199/2025	Pembayaran Belanja Pegawai Uang Makan PNS bulan Desember 2025	0,00	31.402.000,00	12.537.350,00
31-12-2025	00375/KW/401199/2025	Pembayaran Belanja Pegawai Uang Makan PPPK bulan Desember 2025	0,00	7.379.000,00	5.158.350,00
31-12-2025	00175/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	2.524.650,00	2.633.700,00
31-12-2025	00003/SSBP/401199/2025	Pengembalian sisa TUP Desember 2025	0,00	2.445.000,00	188.700,00
31-12-2025	00178/SSP/401199/2025	setor pph 21 final	0,00	188.700,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-aCnEc6Tjg0Mupfp	PTUP Desember	0,00	0,00	0,00
Jumlah			107.995.033,00	123.020.319,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN

ARINA RAHMANIAR, S.KOM

NIP. 198904202011012010

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

Dicetak pada tanggal 05 Januari 2020

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-005.01.2.401199/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (030) Yogyakarta
 Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomer Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNB	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3. Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	247.484,00
3. Selisih	Rp	- 247.484,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00 karena -
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 247.484,00 karena adanya PNB Umum berupa Potongan SPM Belanja Pegawai untuk Pembayaran Sewa Rumah Dinas bulan Desember 2025

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



TASLIM, SH

NIP 197001231995031001

KAB. BANTUL , 31 Desember 2025

Bendahara Penerimaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novialita Pitaloka'.

NOVIALITA PITALOKA, ST.

NIP 198611262011012011

Ditandatangani pada tanggal, 31 Desember 2025

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2025

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0,00
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0,00
2. BP DPK	Rp.	0,00
3. BP Pajak	Rp.	0,00
4. BP Lainnya	Rp.	0,00
5. Jumlah	Rp.	0,00
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0,00
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0,00
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0,00
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	247.484,00
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 247.484,00

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00 karena -

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00 karena karena adanya PNBP Umum berupa Potongan SPM Belanja Pegawai untuk Pembayaran Sewa Rumah Dinas bulan Desember 2025

Bendahara Penerimaan

NOVIALITA PITALONA, ST.

NIP. 198811262011012011

Mengetahui

Pengguna Anggaran



TASLIM, SH

NIP. 197001231995031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 401199 (PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA.BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Bendahara Penerimaan,



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPU Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jl. Ipda Tut Harseno No.53 Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
www.pa-yogyakarta.go.id, pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
Nomor : 785/SEK.W12-A1/PL1.2.5/XII/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima telah dilaksanakan Stock Opname barang persediaan di Gudang persediaan Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta (401199) dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Nominal
1.	Barang Konsumsi	: Rp. 10.494.300
2.	Amunisi	: Rp. -
3.	Bahan Untuk Pemeliharaan	: Rp. 3.357.250
4.	Suku Cadang	: Rp. -
5.	Persediaan untuk Tujuan strategis/ berjaga-jaga	: Rp. -
6.	Pita Cukai dan Leves	: Rp. -
7.	Bahan Baku	: Rp. -
8.	Barang dalam proses/ setengah jadi	: Rp. -
9.	Tanah/ bangunan untuk dijual	: Rp. -
10.	Hewan dan Tanaman untuk dijual	: Rp. -

Sesuai hasil perhitungan, diketahui bahwa posisi barang persediaan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta per tanggal 31 bulan Desember tahun 2025 adalah sebesar total Rp. 13.851.550,- (*Tiga belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah*). Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Stock Opname dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian jumlah barang pada laporan rincian persediaan per bulan Desember tahun 2025 dengan kartu stock barang dan jumlah fisik barang persediaan;
2. Dari hasil stock opname tersebut diketahui bahwa tidak ada perbedaan jumlah barang antara jumlah fisik Barang Persediaan yang tercatat pada Kartu Stock Barang, maupun jumlah pada catatan di Aplikasi Sakti Modul Persediaan.
3. Barang Persediaan yang kondisinya sudah rusak/ usang akan dihapuskan dari pencatatan pada tahun 2026.

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Desember 2025

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang

Kepala Sub. Bagian Umum dan Operator Persediaan
Keuangan

Lasliu, SH
NIP. 19760123.199503.1.001

Muhammad Arief Jauhari, S.AP
NIP. 19780227.200604.1.002

Catut Gunawan, S.E.
NIP. 19800826.200212.1.001

BERITA ACARA PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) BARANG
Per : 31 Desember 2025

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Opname Fisik barang persediaan pada Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta (401199) dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kode Barang	Nama Barang	Saldo SAKTI	Hasil cek fisik	Selisih	Kondisi	Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1010301001000001	Bolp. Meja Debozz 3001	1	1	0	Baik	13.500
2.	1010301001000003	Spidol Snowman Jumbo	5	5	0	Baik	107.500
3.	1010301001000004	Bolpoin Pentel	5	5	0	Baik	415.000
4.	1010301001000005	bolpoin BP TG-340 (blue) tizo	13	13	0	Baik	58.500
5.	1010301001000007	bolpoin BP TG-340 (black) tizo	19	19	0	Baik	85.500
6.	1010301001000011	Isi Pentel Hitam	10	10	0	Baik	230.000
7.	1010301001000016	Bolpoin Standard AE-7	13	13	0	Baik	29.900
8.	1010301001000033	Isi Pentel Biru	17	17	0	Baik	376.500
9.	1010301001000039	Pensil Faber Castle	8	8	0	Baik	32.000
10.	1010301001000049	Boxy Balliner Biru	3	3	0	Baik	50.400
11.	1010301001000052	Boxy Balliner Hitam	16	16	0	Baik	285.600
12.	1010301001000053	Bolpoin Kokoro	13	13	0	Baik	78.000
13.	1010301001000054	Spidol Merah	10	10	0	Baik	14.000
14.	1010301002000004	Tinta Zenith	2	2	0	Baik	7.500
15.	1010301003000001	Binder Clip 200 41mm	44	44	0	Baik	50.800
16.	1010301003000002	Clip Seagul No. 3 (Trigonal)	7	7	0	Baik	24.500
17.	1010301003000013	Binder Clips 111	36	36	0	Baik	18.000
18.	1010301003000023	Binder Clips 260	36	36	0	Baik	54.600
19.	1010301003000024	Binder Clips 105	48	48	0	Baik	14.400
20.	1010301004000001	Penghapus Steadler Kecil	8	8	0	Baik	24.000

No.	Kode Barang	Nama Barang	Saldo SAKTI	Hasil cek fisik	Selisih	Kondisi	Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	1010301004000002	Tipe-X Kenko	4	4	0	Baik	20.000
22.	1010301005000006	Buku Folio 100 Lembar	6	6	0	Baik	120.000
23.	1010301005000007	Buku Ekspedisi 100 Lembar	8	8	0	Baik	88.000
24.	1010301005000008	Buku Kwarto 100 Lembar	10	10	0	Baik	85.000
25.	1010301006000001	Stopmap Kertas	12	12	0	Baik	7.800
26.	1010301006000007	Ordner 1465 10 (black) F4 bantex	6	6	0	Baik	265.000
27.	1010301006000013	Box File Maspion	8	8	0	Baik	264.000
28.	1010301006000032	Business File Inter X	36	36	0	Baik	158.400
29.	1010301006000047	Map Jepit Seagul	24	24	0	Baik	290.400
30.	1010301007000001	Penggaris Besi 30 cm	5	5	0	Baik	40.000
31.	1010301008000001	Cutter Kenko L500/240	5	5	0	Baik	75.000
32.	1010301008000002	Refill cutter kenko	7	7	0	Baik	42.600
33.	1010301010000004	DB Tape 2"Nachi/40	7	7	0	Baik	78.000
34.	1010301010000005	Isolasi Nachi 1"x 72 Panfix	5	5	0	Baik	170.000
35.	1010301010000007	DB Side Tape 24mm	5	5	0	Baik	12.500
36.	1010301010000008	Lakban OPP 48/90/100yd (Clear)Nachi	5	5	0	Baik	62.500
37.	1010301010000009	Isolasi 24x72 Nachi Tanggung Bening	4	4	0	Baik	26.000
38.	1010301010000010	Lem Uhu Stick	3	3	0	Baik	66.000
39.	1010301010000024	Lakban Daimaru 2 48x12 60	4	4	0	Baik	84.000
40.	1010301010000026	Double Tape Foam 24mm Nachi	7	7	0	Baik	74.000
41.	1010301010000034	Lem uhu stick kecil	1	1	0	Baik	13.500
42.	1010301011000005	Stapler hd-10 max	10	10	0	Baik	175.000
43.	1010301011000007	Gunting Tanggung	5	5	0	Baik	40.000
44.	1010301011000008	staples 3-1m japan max	3	3	0	Baik	19.500
45.	1010301011000036	Isi Max K 800	22	22	0	Baik	79.000
46.	1010301011000037	Stapler Max HD 50	5	5	0	Baik	380.000

No.	Kode Barang	Nama Barang	Saldo SAKTI	Hasil cek fisik	Selisih	Kondisi	Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		50					
47.	1010301013000001	ISI GW K/10/1000 (Isi Staples Kecil)	11	11	0	Baik	45.150
48.	1010301013000002	Staples 23/10 Etona (isi stapler) tanggung	5	5	0	Baik	55.000
49.	1010302001000001	Kertas F4 70 SD	22	22	0	Baik	1.267.500
50.	1010302001000006	Kertas F4 Warna	2	2	0	Baik	162.500
51.	1010302001000008	Kertas A4 70 SD	25	25	0	Baik	1.316.250
52.	1010302002000003	Post it PSN-15 Page Maker 5W Pronto	5	5	0	Baik	52.500
53.	1010302002000005	Reffil Tissue Multi	9	9	0	Baik	459.000
54.	1010302002000006	Tissue Roll Multi	8	8	0	Baik	28.000
55.	1010302002000008	Kertas Sertifikat Putih A4 (concorde paper)	3	3	0	Baik	52.500
56.	1010302002000009	Stick note tanggung	5	5	0	Baik	42.500
57.	1010302004000001	Amplop Kecil (KN)	3	3	0	Baik	25.500
58.	1010302004000002	Amplop Tanggung	4	4	0	Baik	60.000
59.	1010302999000007	Mika Transparansi Asahi bening	1	1	0	Baik	58.500
60.	1010304006000003	Flashdisk 32 GB	8	8	0	Baik	576.000
61.	1010304010000004	Mouse USB Logitech	3	3	0	Baik	195.000
62.	1010304999000002	Mouse Pad	4	4	0	Baik	20.000
63.	1010305001000003	Sulak Bulu	5	5	0	Baik	170.000
64.	1010305001000004	Sikat WC	4	4	0	Baik	96.000
65.	1010305001000005	Sikat Pakaian	2	2	0	Baik	22.000
66.	1010305004000004	Kantong plastik sampah hitam besar (garbage bag)	2	2	0	Baik	195.000
67.	1010305008000003	Wipol Karbol	20	20	0	Baik	640.000
68.	1010305008000004	Rinso 900	4	4	0	Baik	156.000
69.	1010305008000006	Polytex Sabut	1	1	0	Baik	3.000
70.	1010305008000009	Refill Hand Soap 375ml Yuri	21	21	0	Baik	456.000
71.	1010305008000011	Sunlight Lime 650ml	5	5	0	Baik	85.000
72.	1010305008000016	Vixal Blue Botol	25	25	0	Baik	531.000
73.	1010305008000031	Cling Fresh	21	21	0	Baik	210.000

No.	Kode Barang	Nama Barang	Saldo SAKTI	Hasil cek fisik	Selisih	Kondisi	Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembersih Kaca					
74.	1010305012000008	Obat Pembersih Lantai	29	29	0	Baik	499.000
75.	1010305012000012	Stella Gantung	10	10	0	Baik	74.250
76.	1010305012000013	Dahlia Kapur Barus Bal5 Refill	8	8	0	Baik	220.000
77.	1010306010000002	Batu Baterai Alkaline AA LR-06	55	55	0	Baik	870.000
78.	1010306010000003	Batu Baterai R20 ABC Besar Senter	1	1	0	Baik	7.500
79.	1010306010000006	Batu Baterai Alkaline AAA	27	27	0	Baik	402.000
80.	1010306010000009	Batu Baterai 9 Volt	1	1	0	Baik	47.000
81.	1010314999000001	Baygon 600ml	1	1	0	Baik	45.000
Total							13.851.550

Petugas Opname Barang .

1. Muhammad Arief Jauhari, S.AP
2. Catur Gunawan, S.E.

TTD

.....

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Eselon I : Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : DI Yogyakarta
 Satuan Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
 No. Dokumen : 001
 Tanggal : 31/12/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112 - Beban langganan telepon	89.750	
	K	212112 - Beban barang yang masih harus dibayar		89.750
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Tagihan telepon pemakaian bulan Desember 2025

Dibuat oleh :

Petugas Akuntansi

Muhammad Arief Jauhari, SAP

Tanggal : 31 Desember 2025

Disetujui oleh :

KPA

Taslim SH

Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh :

Petugas Komputer

Novialita Pitaloka, ST

Tanggal : 31 Desember 2025

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
per 31 Desember 2025**

Lampiran XI

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (0400) Daerah Istimewa Yogyakarta
Satuan Kerja : (401199) Pengadilan Agama Yogyakarta

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	0400	Daerah Istimewa Yogyakarta	401199	Pengadilan Agama Yogyakarta	2025	522112	Belanja Langganan Telepon	89.750	Bukti Pembayaran SPM No.00011A per tanggal 9 Januari 2026 dan SP2D No. 260300000001012 per tanggal 15 Januari 2026	Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2025
JUMLAH TOTAL								89.750		

Yogyakarta, 30 Januari 2026
Sekretaris PA Yogyakarta

Tesslin, SH
NIP. 197001231995031001



JURNAL PENYESUAIAN KHUSUS

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE :2025-12

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON 1 : 01
WILAYAH/PROPINSI : 0400
SATUAN KERJA : 401199
JENIS KEWENANGAN : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Kantor Daerah

Tanggal : 22-01-2026
Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO. AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2025	001	Langganan Telepon bulan Desember 2025	401199.030.212112.0050100.0000000.0000000000.2.0401.2.0000000.00	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0.00	89,750.00	Belum
31-12-2025	001	Langganan Telepon bulan Desember 2025	401199.030.522112.0050100.0000000.0000000000.2.0401.2.0000000.00	522112	Belanja Langganan Telepon	89,750.00	0.00	Belum
						89,750.00	89,750.00	



MONITORING SP2D - BANK

NO	Tanggal Selesai SP2D	NO SP2D NO PENERIMA TANGGAL SP2D	JENIS SPM	SATKER NOMOR INVOICE JUMLAH	BANK PEMBAYAR	BANK PENERIMA NAMA PENERIMA NOMOR REKENING	DESKRIPSI	STATUS
1	09-01-2026 16:36:50	260300000001013 260300000001013000001 15-01-2026	NON GAJI	401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 00012T/401199/2026 Rp. 14.017.784	RPKBUNP.span-BNI	BPD DKI Penerima : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI Rek no: 9901235400000000	Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Januari 2026 untuk 1 invoice	Sukses ambil data SKN Ref No : - Tanggal: 15-01-2026
2	09-01-2026 16:36:30	260300000001012 260300000001012000001 15-01-2026	NON GAJI	401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 00011T/401199/2026 Rp. 89.750	RPKBUNP SPAN BRI	BANK RAKYAT INDONESIA Penerima : PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE Rek no: 120101000014303	Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2026 untuk 2 invoice	Belum dikonfirmasi Bank OVERBOOKING Ref No : - Tanggal: 15-01-2026

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00011A

Tanggal 09-Jan-2026

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 89.750,00

**** DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2026
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-005.01.2.401199/2026
Tanggal : 01-Dec-2025
UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN
ANGGARAN 2026

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : 15-Jan-2026
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

401199.030.522112.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000

89.750,00

Jumlah Pengeluaran

89.750,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

89.750,00

Kepada:

Nomor	: 2536	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK	Rekening	: 120101000014303
NPWP1	: 0010000131093000	Nama Pemilik	: PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
NPWP2	: 0000985846541000	Alamat	: JL. KEBUN SIRIH NO. 12
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2026 untuk 2 invoice		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Kota Yogyakarta, 09 Januari 2026
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.
NIP 197802272006041002

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN

Nomor : 00011A

Tanggal : 09-Jan-2026

Halaman 2 dari 2

No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	0274552998 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	2026-01	31.857,00
2	0274552997 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	2026-01	57.893,00
JUMLAH			89.750,00

INFORMASI BIAYA PENGGUNAAN **TELKOM Solution**
TELKOM Solution BILLING STATEMENT

NPWP/PAK : 0010000131093000

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420260105004011990001
NPWP. NPWP :
CIDNAS. Customer ID :
Nomor Account. Account Number : 401199
Bulan Tagihan. Billing Month : Januari 2026
Tanggal Akhir Pembayaran. Due Date : 20 Januari 2026*)

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

TOTAL TAGIHAN

CHARGE

RP

89.750

ABONEMEN	Rp	57.400
SELULER	Rp	1.070
LOKAL	Rp	250
SLJJ	Rp	0
INTERLOKAL	Rp	0
SLI	Rp	0
LAIN_LAIN	Rp	22.136
JASNITA	Rp	0
TKNET	Rp	0
PPN	Rp	8.894
Tagihan Bulan Ini	Rp	89.750
Saldo Terutang	Rp	0
METERAI	Rp	0

TERBILANG

Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

Amount in Words

Eighty-nine Thousand Seven Hundred Fifty Rupiah

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak yang berlaku

Jakarta, 05 Januari 2026

Satker Name: PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Nomor Rekening: 1201-01-000014-30-3
BANK BRI AN : PT. TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
CABANG : 01201 KK MENARA KEBON SIRIH

Telkom
Indonesia

Rahmalia Dini Putranti

SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

Catatan. Note:

- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021, Kuitansi ini berlaku sebagai Faktur Pajak PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk NPWP/PAKP: 0010000131093000, Jl. Japati No. 1 Bandung
- Based on the Regulation of the Director General of Taxa Number PER-16/PJ/2021, this billing receipt is certified as tax form of PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. NPWP/PAKP: 0010000131093000, Jl. Japati No. 1 Bandung
- Abaikan informasi tagihan ini apabila anda sudah melakukan pembayaran
- Please ignore this billing statement if you have already settled your monthly bill

DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS NAMA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 BULAN : Januari 2026
 JASA TELEKOMUNIKASI

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
 TELKOM REGIONAL II JABAR
 AREA JAKARTA

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420260105004011890001

DEPARTEMEN : OTDA
 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 UNIT ORGANISASI : PEMERINTAHAN
 SERVIS AREA : JAKARTA

No	NO LAYANAN	PERIODE	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJJ	INTER LOKAL	SLI	LAIN- LAIN	JASNITA	TKNET	TAGIHAN	PPN	METERAI	JML TAGIHAN
1	0274552997	202601	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	28.700	1.070	250	0	0	0	22.136	0	0	52.156	5.737	0	57.893
2	0274552998	202601	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	28.700	0	0	0	0	0	0	0	0	28.700	3.157	0	31.857
Total				57.400	1.070	250	0	0	0	22.136	0	0	80.856	8.894	0	89.750

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :

Menerangkan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 89.750
 (Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
 Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

SETUJU DAN SEGERA DISELESAIKAN PEMBAYARANNYA

Jakarta, 05 Januari 2026

Rincian tagihan disiapkan oleh
 RAHMALIA DINI PUTRANTI
 SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Eselon I : Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : DI Yogyakarta
 Satuan Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
 No. Dokumen : 002
 Tanggal : 31/12/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522111 - Beban langganan listrik	14.017.764	
	K	212112 - Beban barang yang masih harus dibayar		14.017.764
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Tagihan listrik pemakaian bulan Desember 2025

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi

Muhammad Arief Jauhari, SAP
Tanggal : 31 Desember 2025

Disetujui oleh :
KPA

Taslim, SH
Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Novialita Pitaloka, ST
Tanggal : 31 Desember 2025

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
per 31 Desember 2025**

Lampiran XI

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (0400) Daerah Istimewa Yogyakarta
Satuan Kerja : (401199) Pengadilan Agama Yogyakarta

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	0400	Daerah Istimewa Yogyakarta	401199	Pengadilan Agama Yogyakarta	2025	522111	Belanja Langganan Listrik	14.017.764	Bukti Pembayaran SPM No. 00012A per tanggal 9 Januari 2026 dan SP2D No. 260300000001013 per tanggal 15 Januari 2026	Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2025
JUMLAH TOTAL								14.017.764		

Yogyakarta, 30 Januari 2026
Sekretaris PA Yogyakarta

Hasim, SH
NIP.197001221995031001

JURNAL PENYESUAIAN KHUSUS
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE :2025-12

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON 1 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI 0400 PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
SATUAN KERJA 401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN KD Kantor Daerah

Tanggal 22-01-2026
Halaman 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO. AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2025	002	Langganan Listrik bulan Desember 2025	401199.030.212112.0050100.0000000.00000 00000.00000.2.0401.2.000000.00	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0.00	14,017,764.00	Belum
31-12-2025	002	Langganan Listrik bulan Desember 2025	401199.030.522111.0050100.0000000.00000 00000.00000.2.0401.2.000000.00	522111	Belanja Langganan Listrik	14,017,764.00	0.00	Belum
						14,017,764.00	14,017,764.00	



MONITORING SP2D - BANK

NO	Tanggal Selesai SP2D	NO SP2D NO PENERIMA TANGGAL SP2D	JENIS SPM	SATKER NOMOR INVOICE JUMLAH	BANK PEMBAYAR	BANK PENERIMA NAMA PENERIMA NOMOR REKENING	DESKRIPSI	STATUS
1	09-01-2026 16:36:50	260300000001013 260300000001013000001 15-01-2026	NON GAJI	401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 00012T/401199/2026 Rp. 14.017.764	RPKBUNP span-BNI	BPD DKI Penerima : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI Rek no: 9901235400000000	Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Januari 2026 untuk 1 invoice	Sukses ambil data SKN Ref No : - Tanggal: 15-01-2026
2	09-01-2026 16:36:30	260300000001012 260300000001012000001 15-01-2026	NON GAJI	401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 00011T/401199/2026 Rp. 89.750	RPKBUNP SPAN BRI	BANK RAKYAT INDONESIA Penerima : PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE Rek no: 120101000014303	Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2026 untuk 2 invoice	Belum dikonfirmasi Bank OVERBOOKING Ref No : - Tanggal: 15-01-2026

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00012A

Tanggal 09-Jan-2026

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 14.017.764,00

**** EMPAT BELAS JUTA TUJUH BELAS RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2026
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-005.01.2.401199/2026
Tanggal : 01-Dec-2025
UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN
ANGGARAN 2026

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : 15-Jan-2026
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

401199.030.522111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000

14.017.764,00

Jumlah Pengeluaran

14.017.764,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

14.017.764,00

Kepada:
Nomor : 3154
Nama Supplier : PT. PLN (PERSERO)
NPWP1 : 0010016293051000
NPWP2 : 0000985846541000
NOP :
Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Januari 2026 untuk 1 invoice

Bank / Pos : BPD DKI
Rekening : 9901235400000000
Nama Pemilik : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI
Alamat : Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Kota Yogyakarta, 09 Januari 2026
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.
NIP 197802272006041002

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN

Nomor : 00012A

Tanggal : 09-Jan-2026

Halaman 2 dari 2

No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	521082356578 KNT PENGADILAN AGAMA YK	2026-01	14.017.764,00
JUMLAH			14.017.764,00



PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TENGAH DAN DIY

Nomor : AGA/PUSAT/2026/401199
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Segera
Perihal : Tagihan Listrik Satker PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA

05 Januari 2026

Kepada Yth :
Kepala
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan tagihan listrik PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Januari 2026 sebesar Rp 14,017,764 (*Empat Belas Juta Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat rupiah*) sesuai dengan daftar terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan juga hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik tersebut, paling lambat tanggal 19 bulan berjalan.
2. Apabila sampai dengan batas waktu di atas belum dilunasi, maka akan dilakukan pemutusan aliran listrik.
3. Pembayaran tagihan dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai berikut :

Bank : BANK DKI
Nomor Virtual Account : 9901235400000000
Nama Pemilik Rekening : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI
Nomor NPWP : 01.001.629.3.051.000
Alamat : Jalan Trunojoyo Blok M1/135 Melawai, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Dikandatangani secara elektronik oleh:
SENIOR MANAGER NIAGA DAN MANAJEMEN
PELANGGAN
PLN DARMADI



PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TENGAH DAN DIY

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN PELANGGAN SATKER PER BULAN

LAMPIRAN SURAT

NOMOR : AGA/PUSAT/2026/401199

TANGGAL : 05 Januari 2026

BATKER : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
KODE SATKER : 401199
NO TAGIHAN : AGA.04/UP3.YGK/2026/401199
BULAN INVOICE : Januari 2026

NO	NAMA PELANGGAN	IDPEL	BULAN TAGIHAN	TARIF	DAYA	PEMAKAIAN KWH				BIAYA BESAN	BIAYA PEMAKAIAN	PPN	LAIN LAIN	JML TAGIHAN SEBELUM METERAI	MAT	JML TAGIHAN SETELAH METERAI
						ST.AWAL	ST.AKHIR	F.KALI	KWH							
1	KNT PENGADILAN AGAMA YK	521082356578	202601	P1	41,500	255,831.36	264,073.50	1	8,242	0	14,007,764	0	0	14,007,764	10,000	14,017,764
		JUMLAH							8,242	0	14,007,764	0	0	14,007,764	10,000	14,017,764

Terbilang

Empat Belas Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah

PT PLN (PERSERO)

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SENIOR MANAGER NIAGA DAN
MANAJEMEN PELANGGAN
DARMADI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Eselon I : Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : DI Yogyakarta
 Satuan Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
 No. Dokumen : 003
 Tanggal : 31/12/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	511339 - Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	914.100.000	
	K	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di bayar		914.100.000

Uraian :

Kekurangan Gaji Induk, Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara bulan Oktober - Desember 2025

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi


 Muhammad Arief Jauhari, SAP
 Tanggal : 31 Desember 2025

Disetujui oleh :
KPA


 Taslim, SH
 Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh :
Petugas Komputer


 Novialita Pitaloka, ST
 Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Eselon I : Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : DI Yogyakarta
 Satuan Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
 No. Dokumen : 004
 Tanggal : 31/12/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Balik Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di bayar	279.134.805	-
	K	511324 - Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	-	279.134.805

Uraian :

Jurnal Balik atas Kekurangan Gaji Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara bulan Oktober - Desember 2025 dikarenakan adanya kesalahan perhitungan nilai

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi

Muhammad Arief Jauhari, SAP
Tanggal : 31 Desember 2025

Disetujui oleh :
KPA

Taslim, SH
Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Novialita Pitaloka, ST
Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Mahkamah Agung RI**
 Eselon I : **Badan Urusan Administrasi**
 Wilayah : **DI Yogyakarta**
 Satuan Kerja : **Pengadilan Agama Yogyakarta**
 No. Dokumen : **007**
 Tanggal : **31/12/2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	511324 - Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	279.212.191	
	K	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di bayar		279.212.191

Uraian :

Koreksi Nilai Kekurangan Gaji Induk, Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara bulan Oktober - Desember 2025

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi

Muhammad Arief Jauhari, SAP
Tanggal : 31 Desember 2025

Disetujui oleh :
KPA

Taslim, SH
Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Novialita Pitaloka, ST
Tanggal : 31 Desember 2025



DAFTAR SP2D SATKER (DETAIL)

NO	NAMA SATKER	NO SP2D	TANGGAL SELESAI SP2D	TGL SP2D	MATA UANG	NILAI SPM	POTONGAN	NILAI SP2D	Nilai SP2D Ekuivalen	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SPM	JENIS SP2D	DESKRIPSI	CEK AKUN
1	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	260300000019471	14/4/2026	15/4/2026	IDR	7.904.700	0	7.904.700	7.904.700	00089T/401199/2026	14/4/2026	GUP	LAINNYA	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun
2	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	260300000019491	14/4/2026	15/4/2026	IDR	93.504.627	21.504.627	72.000.000	93.504.627	00092T/401199/2026	14/4/2026	KEKURANGAN GAJI	LAINNYA	Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Tunjangan Jabatan Hakim Bulan Januari 2026 untuk 2 pegawai	Cek Akun
3	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	260300000019472	14/4/2026	15/4/2026	IDR	282.769.254	66.769.254	216.000.000	282.769.254	00090T/401199/2026	14/4/2026	KEKURANGAN GAJI	LAINNYA	Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Tunjangan Jabatan Hakim Bulan Oktober - Desember 2025 untuk 2 pegawai	Cek Akun
4	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	260300000019492	14/4/2026	15/4/2026	IDR	305.151.351	72.451.351	232.700.000	305.151.351	00093T/401199/2026	14/4/2026	KEKURANGAN GAJI	LAINNYA	Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Tunjangan Jabatan Hakim Bulan Januari 2026 untuk 6 pegawai	Cek Akun
5	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	260300000019501	14/4/2026	15/4/2026	IDR	910.542.937	212.442.937	698.100.000	910.542.937	00091T/401199/2026	14/4/2026	KEKURANGAN GAJI	LAINNYA	Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Tunjangan Jabatan Hakim Bulan Oktober - Desember 2025 untuk 6 pegawai	Cek Akun

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00090A

Tanggal 14-Apr-2026

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 216.000.000,00

**** DUA RATUS ENAM BELAS JUTA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2026
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.401199/2026

Tanggal : 01-Dec-2025
UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN
ANGGARAN 2026

Jenis Tagihan : KEKURANGAN GAJI
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

401199.030.511324.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000

66.769.254,00

401199.030.511339.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000

216.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

282.769.254,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119525.030.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0451.2.000000.000000

66.769.254,00

Jumlah Potongan

66.769.254,00

TOTAL PEMBAYARAN

216.000.000,00

Kepada:

Nomor : 836726
Nama Supplier : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NPWP1 : 0000985846541000
NPWP2 : 0000985846541000
NOP :
ALAMAT : Jl. Ipda Tut Harsono No. 53

Bank / Pos : TERLAMPIR
Rekening : TERLAMPIR
Nama Pemilik : TERLAMPIR
Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Tunjangan
Jabatan Hakim Bulan Oktober - Desember 2025 untuk 2 pegawai

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

W23 1MTAxMDEwNjk2

Kota Yogyakarta, 14 April 2026

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.
NIP 197802272006041002

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00090A

Tanggal : 14-Apr-2026

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	DRS. AZIDDIN SIREGAR, SH 011301047851500 1272010412630003	108.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA DRS. AZIDDIN SIREGAR SH
2	DRS.MUSLIM, SH., MSI. 033901062204506 3404082104610003	108.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA MUSLIM
JUMLAH		216.000.000,00	

Kota Yogyakarta, 14 April 2026

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.

NIP 197802272006041002

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00091A

Tanggal 14-Apr-2026

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 698.100.000,00

**** ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2026
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.401199/2026

Tanggal : 01-Dec-2025
UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN
ANGGARAN 2026

Jenis Tagihan : KEKURANGAN GAJI
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

401199.030.511324.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	212.442.937,00
401199.030.511339.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	698.100.000,00

Jumlah Pengeluaran

910.542.937,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119525.030.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0451.2.000000.000000	212.442.937,00
Jumlah Potongan	212.442.937,00

TOTAL PEMBAYARAN

698.100.000,00

Kepada:

Nomor : 836726	Bank / Pos : TERLAMPIR
Nama Supplier : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	Rekening : TERLAMPIR
NPWP1 : 0000985846541000	Nama Pemilik : TERLAMPIR
NPWP2 : 0000985846541000	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Tunjangan
NOP :	Jabatan Hakim Bulan Oktober - Desember 2025 untuk 6
ALAMAT : Jl. Ipda Tut Harsono No. 53	pegawai

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Kota Yogyakarta, 14 April 2026

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.
NIP 197802272006041002

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00091A

Tanggal : 14-Apr-2026

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	DRA. UFIK NUR ARIFAH HIDAYATI, MSI 7144950498 3471125004680003	108.000.000,00	BANK SYARIAH INDONESIA UFIK NUR ARIFAH HIDAYATI
2	DRS. RIZAL PASI, MH 7313613358 1210012104620002	108.000.000,00	BANK SYARIAH INDONESIA RIZAL PASI
3	KHOIRIYAH ROIHAN, S.AG.,MH 7136688159 1403016609743281	138.300.000,00	BANK SYARIAH INDONESIA KHOIRIYAH
4	MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI, M.HUM. 7039623514 1771061503810002	125.700.000,00	BANK SYARIAH INDONESIA MAMAN ABDUL RAHMAN
5	NURHUDAYAH 7263798699 7501017112620001	108.000.000,00	BANK SYARIAH INDONESIA NURHUDAYAH
6	SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY,SH 7301763397 1673086402770001	110.100.000,00	BANK SYARIAH INDONESIA SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY
JUMLAH		698.100.000,00	

Kota Yogyakarta, 14 April 2026

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.
NIP 197802272006041002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Eselon I : Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : DI Yogyakarta
 Satuan Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
 No. Dokumen : 005, 006
 Tanggal : 31/12/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	511339 - Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	35.200.000	
	K	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di bayar		35.200.000
2	D	511324 - Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	4.928.000	
	K	212111 - Belanja Pegawai yang masih harus di bayar		4.928.000

Uraian :

Kekurangan Gaji Induk bulan Oktober 2025

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi

Disetujui oleh :
KPA

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Muhammad Arief Jauhari, SAP

Taslim, SH

Novialita Pitaloka, ST

Tanggal : 31 Desember 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

**KARTU RINCIAN BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR
per 31 Desember 2025**

Lampiran XI

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (0400) Daerah Istimewa Yogyakarta
Satuan Kerja : (401199) Pengadilan Agama Yogyakarta

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	0400	Daerah Istimewa Yogyakarta	401199	Pengadilan Agama Yogyakarta	2025	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	35.200.000	Perhitungan kekurangan Gaji dari Aplikasi Gaji Web	Kekurangan Gaji Induk bulan Oktober 2025 untuk 1 Pegawai yang sudah Pensiun
2	0400	Daerah Istimewa Yogyakarta	401199	Pengadilan Agama Yogyakarta	2025	511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	4.928.000		
JUMLAH TOTAL								40.128.000		

Yogyakarta, 30 Januari 2026
Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta

Hasan, S.H.
NIP.197001201995031001

DI YOGYAKARTA
PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN JABATAN BULAN OKTOBER 2025

RUANGAN DISEDIAKAN UNTUK CATATAN-CATATAN PEMBUAT DAFTAR GAJI BERSANGKUTAN

PENGHASILAN

1. GAJI POKOK	Rp.	0	
2. TUNJANGAN ISTRI/SUAMI	Rp.	0	
3. TUNJANGAN ANAK	Rp.	0	Rp. 0
4. TUNJANGAN LAIN-LAIN (PERBAIKAN PENGHASILAN)			
5. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	Rp.		
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	Rp.	0	
TUNJANGAN FUNGSIONAL LAIN	Rp.	35.200.000	
6. TUNJANGAN UMUM	Rp.	0	
7. TUNJANGAN TAMBAHAN UMUM	Rp.	0	
	Rp.	0	
8. TUNJANGAN PAPUA	Rp.	0	
9. TUNJANGAN WILAYAH TERPENCIL	Rp.	0	
10. TUNJANGAN BERAS	Rp.	0	

JUMLAH BRUTO Rp. 35.200.000

10. TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN	Rp.	4.928.000
11. PEMBULATAN	Rp.	0

JUMLAH KOTOR Rp. 40.128.000

POTONGAN

1. PFK BERAS	Rp.	0
2. SIMPANAN WAJIB	Rp.	0
3. BPJS	Rp.	0
4. BPJS KELUARGA YG LAIN	Rp.	0
5. SEWA RUMAH	Rp.	0
6. TUNGGAKAN	Rp.	0
7. HUTANG KELEBIHAN	Rp.	0
8. LAIN-LAIN	Rp.	0
9. PAJAK PENGHASILAN	Rp.	4.928.000
10. TABUNGAN PERUMAHAN	Rp.	0

JUMLAH POTONGAN Rp. 4.928.000

JUMLAH BERSIH Rp. 35.200.000

TIGA PULUH LIMA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

JUMLAH PNS DAN KELUARGA

NO.	GOL	JUMLAH PNS	ISTRI/SUAMI	ANAK	JUMLAH
1.	IV	1	1	0	2
2.	III	0	0	0	0
3.	II	0	0	0	0
4.	I	0	0	0	0
JUMLAH		1	1	0	2

DIBUAT UNTUK LEMBAR ASLI/KEDUA

Yogyakarta , 11 Pebruari 2026

PENGELOLA GAJI/PPABP



NOVIALITA PITALOKA, ST
NIP 198611262011012011

MENGETAHUI/MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



VERAWATI WIDJAYA, SH
NIP 197806251999022001

BENDAHARA PENGELUARAN



ARINA RAHMANIAR, S.KOM
NIP 198904202011012010

DAFTAR GAJI YANG DIBUAT TELAH BERDASARKAN PERHITUNGAN YANG SEBENARNYA, APABILA TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BERSEDIA MENSETORKAN KE REKENING KAS NEGARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
YOGYAKARTA

GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA BLOK D JALAN KUSUMANEGARA NO.11 YOGYAKARTA 55166
TELEPON (0274) 542011, FAKS. (0274) 554634 Website: www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id

BERITA ACARA
PENGESAHAN MPHBJJS
NOMOR: BA-35/KPN.1501/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh lima, sesuai dengan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga tanggal 24-04-2024 Nomor 823290541998348529 telah dilakukan pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah pada ledger akrual SPAN dengan rincian sebagai berikut :

NIP User : 198312082003122001
Jenis Modul : SPAN General Ledger
Buku Besar : Akrual
Kategori : Penyesuaian
Periode : April 2025
Tanggal Akuntansi : 24-04-2025

Rincian

No	Akun	Deskripsi Akun	Kode Satker	Total Nilai	
				Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	132111	Peralatan dan mesin	050.01.401199	58.006.000,-	-
2	431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang	999.02.977263	-	58.006.000,-

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

User Pembuat Jurnal



Meliyana

Kepala Seksi Vera



Endang Zainatun

Mengetahui,
Kepala KPPN Yogyakarta



Arvi Risnawati





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH
LANGSUNG BENTUK BARANG / JASA / SURAT
BERHARGA

Nomor : 00076T
Tanggal : 24-04-2025
Saiker : 401199 - PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA

KPPN : 030 - YOGYAKARTA
Tanggal : 24-04-2025
Nomor : 823290541998348529
Tahun Anggaran : 2025

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	Rp	0
Pendapatan	Rp	58.006.000
Belanja	Rp	58.006.000
Saldo Akhir	Rp	0

Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Barang TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor 256/SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/IV/2025 tanggal 15-04-2025

Yogyakarta, 24-04-2025
Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Endang Zainatun



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jl. Ipda Tut Harsono No.63 Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
www.pa-yogyakarta.go.id, pa_yogyakarta@yahoo.co.id; aumma@pa-yogyakarta.net

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP3HL-BJS)
NOMOR : 275 /SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/IV/2025
TANGGAL : 22 APRIL 2025**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
Jalan Kusumanegara Nomor 11
Yogyakarta

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa barang/jasa/surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/Esselon 1 : 005/ Mahkamah Agung R.I
Kode dan Nama Satuan Kerja : 401199/ Pengadilan Agama Yogyakarta

Pemberi Hibah

Negara Donor : Indonesia
Nama Donor : PT Media Sarana Data
Nama Proyek : Hibah Langsung Barang dari PT Media Sarana Data
untuk Pengadilan Agama Yogyakarta

Nomor dan Tanggal Perjanjian Hibah : 256/SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/IV/2025
Tanggal : 14 April 2025

Nilai Hibah : Rp 58.006.000 (Lima puluh delapan juta enam ribu rupiah)

Rincian Pendapatan Hibah

Nomor Register : 2XKA9L7A
Nilai Realisasi Hibah : Rp 58.006.000 (Lima puluh delapan juta enam ribu rupiah)
Bentuk Hibah : Barang
Akun : 431121



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI) BSSN.

Yogyakarta, 22 April 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Yogyakarta

H. Faslim, S.H.

NHP. 19700123 199503 1 001



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1148/SEK/SK.PL1.2.3/IV/2025

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/ KEKAYAAN NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terdapat permohonan penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan yang sudah rusak berat dan tidak bisa dipergunakan lagi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana surat Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 357/SEK.PTA.W12-A/PL1.2.3/IV/2025 tanggal 14 April 2025;

b. Bahwa demi efisiensi pengelolaan dan tertib administrasi dipandang perlu menghapuskan Selain Tanah Dan/Atau Bangunan tersebut pada Pengadilan Agama Yogyakarta dari Daftar Inventaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

- 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 13. Nota Kesepakatan bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049 Tahun 2005, MA/SEK/167/SK/IX/2005 tentang Serah Terima Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama;
 14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 Perihal Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama Untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan Atas Permohonan

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara;

15. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516/SEK/PL1.2/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Agama Yogyakarta;
16. Salinan Risalah Lelang Nomor 60/09.05/2025-01 tanggal 13 Maret 2025 dengan harga penawaran tertinggi Selain Tanah Dan/Atau Bangunan terjual sebesar Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
17. Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/SEK.PA.W12-A1/PL.1.2/III/2025 tanggal 19 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.

KESATU : Menghapus dan/atau mengeluarkan barang milik negara sebagaimana termuat pada lampiran keputusan ini dari Daftar Inventaris Pengadilan Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak keputusan ini ditetapkan;

KEDUA : Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta wajib mengirimkan:

1. Laporan pelaksanaan penghapusan barang milik negara kepada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dengan melampirkan Surat Keputusan Penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani.
2. Daftar Barang Milik Negara (BMN) yang di hapus, dilaporkan sebagai mutasi pengurangan aset kepada Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan melampirkan Register Transaksi Harian (RTH) Penghapusan.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 24 April 2025

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta untuk dilaksanakan/
dilaporkan sebagaimana mestinya.



SALINAN

RISALAH LELANG

NOMOR : 60/09.05/2025-01
TANGGAL : 13 MARET 2025
PEJABAT LELANG : SUTARI EMA YARSI
PENJUAL : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

- a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
- b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
- c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

- a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
- b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
- c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

---Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

---Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

---Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

- 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
- 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

---Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

---Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

—Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

—Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

—Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

—Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

—Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pejabat Lelang

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari Instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Yogyakarta. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

Satu paket inventaris terdiri dari satu unit lemari kayu, satu unit mesin antrian, satu unit kursi besi/metal, tiga unit televisi, dua unit uninterruptible power supply (UPS), dan empat unit P.C unit. -----

Harga Lelang ----- : Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Heru Cahyono, NIK 3308203008790001, Buruh Harian
Lepas, beralamat di Dusun Margo Agung RT/RW. 017/006,
Kelurahan/Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten
Magelang, Provinsi Jawa Tengah -----

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 12 (dua belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Taslim, S.H.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 19 MAR 2025
Kepala KPKNL Yogyakarta



Tuti Kurniyaningsih
NIP 19750923 199503 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
YOGYAKARTA

GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA BLOK D JALAN KUSUMANEGARA NO.11 YOGYAKARTA 55166
TELEPON (0274) 542011, FAKS. (0274) 554634 Website: www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id

BERITA ACARA
PENGESAHAN MPHBJIS
NOMOR: BA-02/KPN.1501/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam,, sesuai dengan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga tanggal 31-12-2025 Nomor 8284835811056574900 telah dilakukan pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah pada ledger akrual SPAN dengan rincian sebagai berikut :

NIP User : 198312082003122001
Jenis Modul : SPAN General Ledger
Buku Besar : Akrual
Kategori : Penyesuaian
Periode : Desember 2025
Tanggal Akuntansi : 31-12-2025

Rincian

No	Akun	Deskripsi Akun	Kode Satker	Total Nilai	
				Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	521252	Belanja Peralatan dan Mesin- Ekstrakomtabel	005.01.401199	1.700.000,-	-
2	431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang	999.02.977263	-	1.700.000,-

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

User Pembuat Jurnal



Meliyana

Kepala Seksi Vera



Endang Zainatun

Mengetahui,
Kepala KPPN Yogyakarta



Arvi Risnawati





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH
LANGSUNG BENTUK BARANG / JASA / SURAT
BERHARGA

Nomor : 00220T
Tanggal : 31-12-2025
Satker : 401199 - PENGADILAN AGAMA
 YOGYAKARTA

KPPN : 030 - YOGYAKARTA
Tanggal : 31-12-2025
Nomor : 8284835811056574900
Tahun Anggaran : 2025

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	Rp	0
Pendapatan	Rp	1.700.000
Belanja	Rp	1.700.000
Saldo Akhir	Rp	0

Yaitu : Hibah Barang dari Khoiriyah Roihan

Yogyakarta, 05-01-2025
Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Endang Zainatun





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jl. Ipda Tut Harsana No.53 Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
www.pa-yogyakarta.go.id, pa.yogyakarta@yahoo.co.id, admin@pa-yogyakarta.net

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP3HL-BJS)
NOMOR : 789/SEK.W12-A1/PL1.2.4/XII/2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
Jalan Kusumanegara Nomor 11
Yogyakarta

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa barang/jasa/surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/Esselon 1 : 005/ Mahkamah Agung R.I
Kode dan Nama Satuan Kerja : 401199/ Pengadilan Agama Yogyakarta

Pemberi Hibah

Negara Donor : Indonesia
Nama Donor : Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.
Nama Proyek : Hibah Langsung Barang dari Dr.Khoiriyah Roihan, S.Ag,M.H.
untuk Pengadilan Agama Yogyakarta

Nomor/Tanggal Perjanjian Hibah : 758/SEK.W12-A1/PL1.2.4/XII/2025

Tanggal : 23 Desember 2025

Nilai Hibah : Rp 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Rincian Pendapatan Hibah

Nomor Register : 28RQWPXA
Nilai Realisasi Hibah : Rp 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
Bentuk Hibah : Barang
Akun : 431121

Yogyakarta, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Yogyakarta

A.Taslim, S.H.

NIP. 19700123 199503 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN